

**PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENTIAL DAN MIKROPRUDENTIAL
TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Sarah Nabiella Damayanti

(165020401111008)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Gelar Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENTIAL DAN MIKROPRUDENTIAL TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

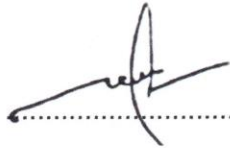
Yang disusun oleh :

Nama : Sarah Nabiella Damayanti
NIM : 165020401111008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **28 Mei 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

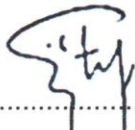
1. Prof. Dr. Ghozali Maski., SE., MS.
NIP. 19580927 198601 1 002
(Dosen Pembimbing)



2. Dias Satria , SE., M. App. Ec., Ph.D.
NIP. 1982807 200501 1 002
(Dosen Penguji I)



3. Setyo Tri Wahyudi, SE, M Ec., Ph. D.
NIP. 19810702200501 1 002
(Dosen Penguji II)



Malang, 28 Mei 2020
Ketua Program Studi


Setyo Tri Wahyudi, SE, M Ec., Ph. D.
NIP. 19810702200501 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Sarah Nabiella Damayanti
Tempat, tanggal lahir : Malang, 19 Juni 1998
NIM : 165020401111008
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan
Alamat : Jl. Raya Pakisaji No. 40 RT 01 / RW 01

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

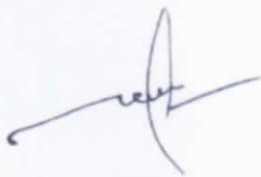
**Pengaruh Kebijakan Makroprudential Dan Mikroprudential Terhadap Stabilitas Sistem
Keuangan Di Indonesia**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Ghazali Maski., SE., MS.
NIP : 19580927 198601 1 002

Malang, 1 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



Sarah Nabiella Damayanti
NIM : 165020401111008

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph. D.
NIP : 19810702 200501 1 002

PENGALAMAN KEPANITIAAN

- 2016 : Divisi PDD, “Hari anti Anti Narkoba 2016”, diselenggarakan oleh TEGZAS FEB UB 2016 di Universitas Brawijaya – Malang
- 2016 : Divisi Humas, “PELATIHAN PENYULUHAN 2016”, diselenggarakan oleh TEGZAS UB 2016 di Universitas Brawijaya – Malang
- 2017 : Divisi Konsumsi, “Hari Anti Narkoba International” (HANI) 2017”, diselenggarakan oleh TEGZAS UB 2017 di Universitas Brawijaya – Malang
- 2017 : Divisi PDD, “Malam Renungan Aids 2017”, diselenggarakan oleh TEGZAS UB 2017 di Universitas Brawijaya – Malang
- 2018 : Divisi KORLAP, “DIKLATSAR TEGZAS 2018”, diselenggarakan oleh TEGZAS UB 2018 di Coban Talun – Malang
- 2018 : Divisi Perkap, “Hari Anti Narkoba International” (HANI) 2017”, diselenggarakan oleh TEGZAS UB 2018 di Universitas Brawijaya – Malang
- 2019 : *Traing of trainee (Monetary economics and Banking) 2019* – FEB UB, Universitas Brawijaya
- 2019 : Panitia kelompok pemungutan suara “Presiden dan Wakil Presiden” di Kabupaten

PENGALAMAN LAINNYA

- 2017 : PEMATERI PROBINMABA – FAPET, Universitas Brawijaya
- 2017 : PEMATERI PROBINMABA – FK, Universitas Brawijaya
- 2017 : PEMATERI PROBINMABA – VOKASI, Universitas Brawijaya
- 2017 : PEMATERI PRA PENMAS “Pelatihan Penyuluhan” – FKG, Universitas Brawijaya
- 2018 : PESERTA DIKSAR – PENYULUH FORUM MASYRAKAT ANTI NARKOBA (FORMAN)
- 2020 : KKN - P di PT. Bank Jatim Cabang Kepanjen

6. Keluarga tersayang saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyaknya keluarga yang memberikan dukungan kepada saya selama kuliah.

7. Teman-teman Program Studi Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan angkatan 2016 yang juga telah menemani dan memberikan banyak dukungan serta carita indah dalam menjalani perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

8. Sahabat saya yang memberikan banyak warna dalam masa perkuliahan saya, Herni Susilowati, Debbie Julia Gibson dan Billy Shabillilah. Tidak lupa teman kos 139, yang telah menjadi keluarga kedua pada masa perkuliahan saya.

9. Serta pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan support serta doa yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa harapan saya agar skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk dapat membangun potensi yang positif dalam penulisan skripsi saya dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan penulisan skripsi bagi adik adik tingkat selanjutnya.

Malang, 30 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II Tinjauan Pustaka	8
2.1 Kebijakan Makroprudential Bank Indonesia	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Makroprudential	8
2.1.2 Tujuan Kebijakan Makroprudential	9
2.1.3 Konsep Kebijakan Makroprudential	10
2.1.4 Jenis Dan Pembahasan Kebijakan Makroprudential	11
2.1.4.1 Giro Wajib Minimum (GWM LFR)	11
2.1.4.2 Loan To Value (LTV)	12
2.1.4.3 Net Open Position	13
2.2 Kebijakan Mikroprudential Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	13
2.2.1 Kewenangan OJK Terhadap Kebijakan Mikroprudential	13
2.2.2 Jenis Dan Pembahasan Kebijakan Mikroprudential	14
2.2.2.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)	14
2.2.2.2 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	15

2.2.2.3 Loan To Deposit Ratio (LDR).....	15
2.2.2.4 Return Of Assets (ROA).....	15
2.2.2.5 Non Performing Loan (NPL).....	16
2.3 Hubungan Kebijakan Makroprudential dan Mikroprudential.....	16
2.3.1 Mandat Bank Indonesia Terhadap Perbedaan Kebijakan Makroprudential Dan Mikroprudential.....	17
2.4 Stabilitas Sistem Keuangan.....	20
2.4.1 Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan.....	21
2.5 Implementasi Kebijakan Makroprudential dan Mikroprudential Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.....	23
2.6 Peran Stabilitas Sistem Keuangan dalam Perekonomian.....	26
2.7 Makroprudential dan Mikroprudential Sebagai Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan.....	27
2.8 Penelitian Terdahulu.....	29
2.9 Kerangka Penelitian.....	29
2.10 Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Jenis Data dan Sumber Penelitian.....	33
3.3 Definisi Variabel Operasional.....	34
3.4 Metode Analisis Data.....	35
3.4.1 Analisis Metode Faktor.....	36
3.4.1.1 Analisis Konfirmatori.....	37
3.4.2 Metode Regresi Linear Berganda.....	39
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.1.1	Gambaran Umum Stabilitas Sistem Keuangan.....	43
4.1.2	Gambaran Umum Bank Buku 4 Indoonesia.....	43
4.1.3	Gambaran GWM LFR Bank Buku 4.....	44
4.1.4	Gambaran LTV Bank Buku 4.....	45
4.1.5	Gambaran NOP Bank Buku 4.....	46
4.1.6	Gambaran CAR Bank Buku 4.....	46
4.1.7	Gambaran BOPO Bank Buku 4.....	47
4.1.8	Gambaran LDR Bank Buku 4.....	48
4.1.9	Gambaran ROA Bank Buku 4.....	49
4.1.10	Gambaran NPL Bank Buku 4.....	49
4.2	Hasil Analisis statistik.....	49
4.3	Uji Hasil Analisis Faktor.....	49
4.3.1	Hasil Uji KMO dan Barletts test.....	49
4.3.2	Hasil Uji Component Matrix.....	50
4.3.3	Hasil Uji Analisis Faktor Konfirmatori.....	51
4.4	Hasil Model Regresi Linear Berganda.....	52
4.5	Hasil Uji Hipotesis Regresi.....	53
4.5.1	Hasl Uji Simultan (Uji F).....	53
4.5.2	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	54
4.5.3	Hasil Uji Koefisen Determinasi (adjusted R^2).....	54
4.6	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	55
4.6.1	Hasil Uji Normalitas.....	56
4.6.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
4.6.3	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	57
4.6.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	57

4.7 Hasil dan Uji Hipotesis Mix Estimation.....	58
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Implementasi Makroprudential dan Mikroprudential.....	1
Gambar 1.2 Indikator Kinerja Bank Konvensional.....	5
Gambar 2.1 Desain dan Implementasi Kebijakan Makroprudential.....	10
Gambar 2.2 Transmisi Kebijakan Makroprudential.....	11
Gambar 2.3 Hubungan Kebijakan Makroprudential dan Mikroprudential	17
Gambar 2.4 Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan.....	21
Gambar 2.5 Implementasi Kebijakan Makroprudential dan Mikroprudential.....	22
Gambar 2.6 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan.....	23
Gambar 2.7 Framework Stabilitas Sistem Keuangan.....	25
Gambar 2.8 Konsep Stabilitas Sistem Keuangan.....	26
Gambar 2.9 Kerangka Penelitian.....	30
Gambar 3.1 Model Faktor Konfirmatori.....	38

DAFTAR GRAFIK

Garfik 4.1 Grafik Perkembangan Variabel GWM LFR Bank BUKU 4.....	44
Garfik 4.2 Grafik Perkembangan Variabel LTV Bank BUKU 4.....	45
Garfik 4.3 Grafik Perkembangan Variabel NOP Bank BUKU 4.....	45
Garfik 4.4 Grafik Perkembangan Variabel CAR Bank BUKU 4.....	46
Garfik 4.5 Grafik Perkembangan Variabel BOPO Bank BUKU 4.....	46
Garfik 4.6 Grafik Perkembangan Variabel LDR Bank BUKU 4.....	46
Garfik 4.7 Grafik Perkembangan Variabel ROA Bank BUKU 4.....	47
Garfik 4.8 Grafik Perkembangan Variabel NPLBank BUKU 4.....	49



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Kebijakan Makroprudential dan Mikroprudential.....	18
Tabel 3.1 Sumber Data Penelitian.....	33
Tabel 3.2 variabel kebijakan makroprudential dan mikroprudential.....	34
Tabel 4.1 Hasil Uji KMO Dan Bartltes Test.....	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Component Matrix Variabel Makroprudential.....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Component Matrix Variabel Mikroprudential.....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Simulan (Uji F)	53
Tabel 4. 6 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	54
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)	55
Tabeel 4. 8 Hasil Uji Normalitas Variabel.....	56
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4. 10Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 4. 11 Hasil Uji autokorelasi.....	58
Tabel 4.12 Nilai Loading Faktor Mix Estimation.....	60

ABSTRAK

Kebijakan makroprudential merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh keterkaitan kebijakan makroprudential dan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif, bersifat kausal komparatif, metode penelitian dengan studi korelasional. Sumber data penelitian diperoleh dari website, metode analisa menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian kebijakan makroprudential dan mikroprudential berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Variabel pada kebijakan makroprudential dan mikroprudential berpengaruh secara keseluruhan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia dan terhadap stabilitas institusi keuangan. Kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial memiliki hubungan dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan dengan mencegah timbulnya berbagai resiko yang timbul dalam sistem keuangan. Apabila individu institusi keuangan efektif mengelola lembaga keuangan, dan apabila kebijakan sistem keuangan secara keseluruhan efektif, maka memberikan dampak yang baik terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kata kunci: Kebijakan Makroprudential, Mikroprudential, Stabilitas Sistem Keuangan.

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, masih terdengar asing oleh kaum yang masih awam terhadap istilah perekonomian yang masih baru. Masih banyak yang belum mengetahui apa pengertian dari kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, bagaimana isi dari kedua kebijakan tersebut, tujuan seperti apa yang ingin dicapai dari adanya kebijakan ini, dan bagaimana kinerja dari adanya kedua kebijakan tersebut berjalan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia.

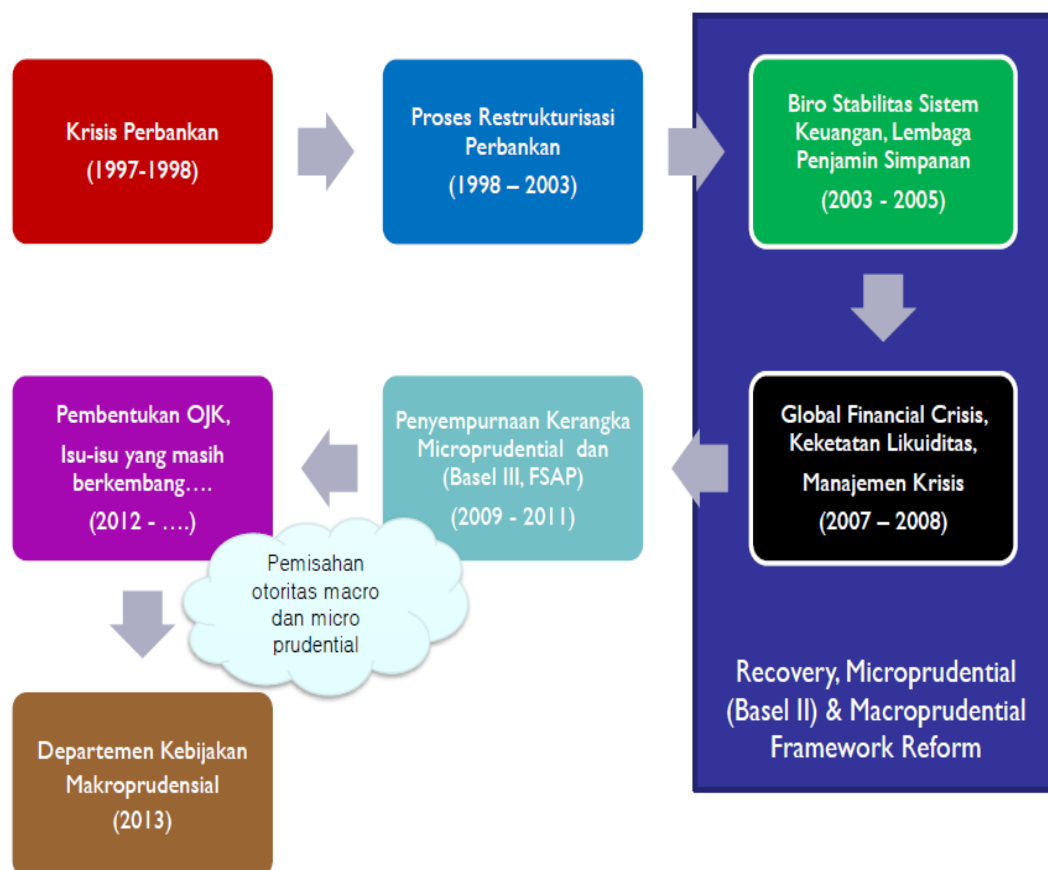
Kebijakan Makroprudensial mengemuka dan menjadi sangat populer disektor keuangan paska terjadinya krisis keuangan global. Krisis keuangan tersebut terjadi karena belum diterapkannya kebijakan makroprudensial yang efektif dinegara maju, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan dinamika di sektor keuangan yang bersumber dari interaksi antara makro ekonomi dengan mikro ekonomi. Pendekatan makroprudensial sudah dijalankan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akibat krisis keuangan Asia tahun 1997/1998.

Pengalaman krisis tersebut sesungguhnya telah memberikan pelajaran yang berharga, sehingga saat krisis keuangan global 2007/2008 yang dipicu oleh kegagalan produk subprime mortgage di Amerika Serikat, Bank Indonesia dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, sudah lebih siap dengan berbagai langkah yang dapat menahan gejolak kondisi ekonomi dan sistem keuangan di dalam negeri. Selanjutnya dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi mikroprudensial yang terkait dengan kesehatan, kinerja, dan kelangsungan usaha individual bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013. Pembagian tugas antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dikhususkan agar pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya berjalan lebih baik dan mempunyai sistem pengawasan yang lebih efektif. Sementara Bank Indonesia diamanatkan untuk tetap menjalankan fungsi makroprudensial dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemban amanat menjalankan fungsi kebijakan mikroprudensial.

Kegagalan kebijakan makroekonomi, kegagalan regulasi, serta kegagalan pasar, mendorong Bank Sentral mengupayakan suatu kebijakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat krisis, maka perlu adanya kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial sebagai alat untuk membentengi permasalahan yang terjadi akibat krisis. Tujuan utama dari terbitnya dua kebijakan ini adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Gambar 1.1 : Implementasi Makroprudensial dan Mikroprudential

Sumber : Bank Indonesia, Press Training of Trainers Macroprudential, 2017



Kebijakan makroprudensial dan mikroprudential sudah sejak lama menjadi bagian integral dari kebijakan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari kebijakan ini perlu adanya pengembangan dan perbaikan kebijakan, sebagaimana dilakukan *Financial Service Authority* atau biasa dikenal dengan otoritas keuangan dunia, Bank Indonesia terus berupaya melakukan pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial yang sejalan dengan standar dan praktik-praktik terbaik di tataran internasional, demi menunjang stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Demi terwujudnya dan terlaksanakannya kebijakan ini dengan efektif diharapkan tercapainya kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudential sehingga dapat membantu peningkatan efektivitas pengendalian risiko sistemik dan ketidakseimbangan keuangan untuk mendorong terwujudnya stabilitas sistem keuangan.

Arti dari stabilitas sistem keuangan itu sendiri adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional (PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial). Sementara, sistem keuangan sendiri adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, risiko sistemik didefinisikan sebagai potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), keterkaitan antarinstansi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).

Stabilitas sistem keuangan juga berperan penting dalam penentuan stabilitas harga secara makro. Karena jika sistem keuangan yang digunakan baik dan benar, maka stabilitas harga akan mudah dicapai. Stabilitas harga tentunya akan berpengaruh secara langsung terhadap keseimbangan pasar yang ada. Sehingga dampak positif dari adanya stabilitas harga yang dikendalikan oleh stabilitas sistem keuangan ini akan membuat terpenuhinya demand secara baik dan terciptanya ekuilibrium pasar. Selain berperan penting dalam penentuan stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan juga memicu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian menggambarkan keadaan perekonomian suatu negara, dimana jika pertumbuhan perekonomian suatu negara tinggi maka negara tersebut perekonomiannya akan semakin membaik.

Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membentuk Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK). Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK) merupakan badan khusus yang dibentuk oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan tugasnya dalam melakukan Kajian Sistem Keuangan (KSK), dimana Bank Indonesia berperan penting dalam mengkaji sistem keuangan yang ada melalui laporan yang diterima Komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) pada kuartal I

2019 yang disimpulkan stabilitas sistem keuangan Indonesia dalam kondisi normal dan terjaga dengan baik. Hal ini berdasarkan pemantauan perkembangan di sektor perekonomian secara keseluruhan, baik dalam negeri maupun global. Beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan KSSK sendiri adalah kondisi perekonomian global. IMF sendiri mengkoreksi pertumbuhan ekonomi dunia

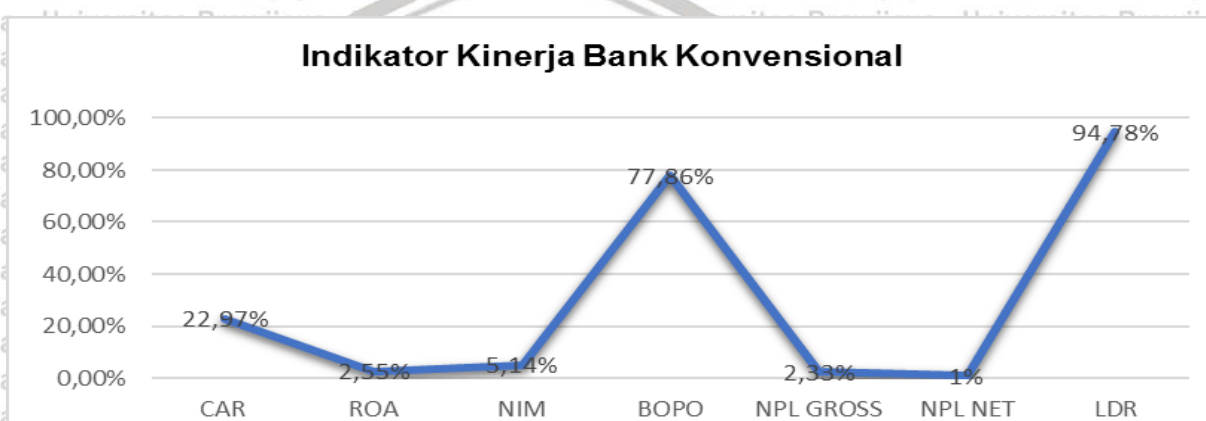
Perkembangan ekonomi dunia telah tumbuh secara agresif dalam kurun waktu singkat, serta kemungkinan penerapan kebijakan makro ekonomi yang lebih kuat. Perkembangan ekonomi dunia yang demikian pesat tidak lepas dari perubahan signifikan perekonomian beberapa negara. Hal-hal lain yang telah memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dunia antara lain adalah pesatnya perkembangan ekonomi di Cina, India, dan Rusia. Selain itu, reformasi di pasar tenaga kerja dan liberalisasi pasar financial di negara-negara maju telah turut membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam setiap perubahan harus ada satu hal yang tetap ada guna menjaga kesinambungan perubahan itu, yaitu sebuah *element of continuity*. Dalam perekonomian yang bertindak sebagai *element of continuity* adalah kestabilan moneter, hal ini membuat Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudential dan mikroprudential demi tercapainya sistem regulasi perkonimian yang stabil, agar tidak terguncang dari adanya konflik perekonomian dunia yang tidak stabil.

Komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) juga mengamati gejolak Amerika Serikat (AS) dengan China dari segi moneter. KSSK menilai potensi perekonomian global mengalami pelemahan dan penurunan perdagangan dunia. Merespons hal tersebut kebijakan makroprudential dan mikroprudential, memataui dan mengawasi sistem regulasi perekonomian secara keseluruhan maupun dari individu perbankan, agar sitem keuangan kembali stabil dari adanya gejolak perang dagang China dan AS. Komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudential dan mikroprudential, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan terus menopang pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 1 2019 ini. Komite stabilitas stistem keuangan (KSSK) kemudian akan merekomendasikan untuk memperbaiki sistem keungan yang ada jika kinerjanya tidak maksimal melalui kebijakan makroprudential dan mikroprudential.

Parameter lain yang membedakan antara kebijakan makroprudensial dengan mikroprudensial adalah kebijakan mikroprudensial dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) adalah cukup dengan dengan menggunakan parameter dari tingkat kesehatan dan hasil kinerja dari institusi keuangan secara individu saja. Sedangkan

kebijakan makroprudensial memiliki pencapaian lain daripada parameter yang dikemukakan oleh kebijakan mikroprudensial. Dimana kebijakan makroprudensial menganggap bahwa jika terjadi kegagalan pencapaian dari institusi keuangan secara individu tidak akan mengganggu kinerja sistem keuangan secara keseluruhan jika dampak yang ditimbulkan sedikit. Dampak yang akan dirasakan bisa berupa kegagalan dari beberapa institusi keuangan yang dapat mengganggu kinerja sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi menurut kebijakan makroprudensial, tidak cukup jika hanya mengkaji institusi keuangan secara individu saja.

Gambar 1. 2 : Indikator Kinerja Bank Konvensional



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, 2019

Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh instrument dari dua kebijakan yaitu, kebijakan makroprudential dengan instrument *CAR*, *NPL*, *LDR* dan *LTV* dengan kebijakan mikroprudential yaitu, *BOPO*, *ROA*, *GWM* *LFR* dan *NOP* Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Fungsi intermediasi bank umum konvensional cukup baik dengan kredit tumbuh jika dilihat dari instrument diatas di tengah DPK yang tumbuh melambat sebesar 6,37%. Dengan terjadinya funding gap tersebut, kondisi likuiditas perbankan sedikit menegat dengan *LDR* mencapai 94,78%. Bila dilihat dari kondisi tersebut likuiditas perbankan secara umum masih terjaga dan terkendali dalam kondisi aman. Dengan hal ini maka bank umum konvensional dalam kondisi membaik.

Dampak dari penerapan kebijakan makroprudential dan kebijakan mikroprudential sejauh ini dari beberapa negara masih sangat efektif. Terutama pada negara Indonesia,

kedua kebijakan ini berjalan seiringan, maka dari hal tersebut penerapan kebijakan akan berjalan efektif dan efisien. Terbukti adanya permasalahan perkonomian yang terjadi, kebijakan makroprudential dan mikroprudential mampu menjaga kestabilan ekonomi baik dalam jangka pendek dan panjang, mengingat ekspansi atau pertumbuhan ekonomi tidak akan berlangsung tanpa ada kestabilan ekonomi

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kebijakan makroprudensial yang menjadi tugas utama BI adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan, kebijakan mikroprudential dilakukan untuk menilai masing-masing individu bank atau lembaga keuangan. Di Indonesia risiko instabilitas sistem keuangan berasal dari tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah, maka kebijakan makroprudensial yang diambil oleh BI akan selalu mengarah kepada usaha untuk menuntaskan kedua masalah tersebut.

Dalam kapasitasnya menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak seluruh cakupan dalam sistem keuangan berada dalam wewenang Bank Indonesia. Di sisi lain, sebagai sebuah sistem, stabilitas keuangan harus dilakukan secara utuh. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh diperlukan kerangka kerjasama dengan lembaga terkait yaitu pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dan gesekan kepentingan dari masing-masing lembaga terkait. Maka dari itu, penulis mengangkat tema penelitian **“Pengaruh Kebijakan Makroprudential Dan Mikroprudential Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kebijakan makroprudential dan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh keterkaitan kebijakan makroprudential dan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan memberi gambaran bagi peneliti terkait adanya kebijakan makroprudential dan kebijakan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai hubungan kebijakan makroprudential dengan kebijakan mikroprudential dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan ketika diberlakukannya suatu kebijakan makroprudential dan kebijakan mikroprudential.

3. Manfaat Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan bahan tinjauan mengenai hubungan kebijakan makroprudential dan kebijakan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II**Tinjauan Pustaka****2.1 Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia**

Kebijakan makroprudensial dimulai sejak tahap awal pemantauan risiko, hingga berlanjut ketahap pemilihan instrumen kebijakan yang diperlukan. Tahap terakhir adalah evaluasi untuk mengetahui efektivitas tindakan yang diambil. Langkah ini untuk menekan pertumbuhan yang bersifat konsumtif maupun yang ditopang oleh kredit, karena bisa mengancam stabilitas sistem keuangan.

2.1.1 Pengertian Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang mengatur tentang sistem keuangan secara keseluruhan. Sistem keuangan adalah kumpulan dari beberapa institusi keuangan dengan tujuan stabilitas ekonomi. Didalam institusi tersebut terdapat dua pihak yaitu surplus unit dan defisit unit. Surplus unit merupakan pihak yang ada di dalam sekumpulan beberapa institusi yang memiliki kelebihan dana. Sedangkan defisit unit merupakan pihak yang ada di dalam sekumpulan beberapa institusi yang memiliki kekurangan dana. Pihak surplus unit bertugas untuk meminjamkan kelebihan dana yang dimiliki kepada pihak defisit unit, sehingga tidak ada lagi pihak yang kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana. Hal ini akan menciptakan stabilitas perekonomian pada sistem keuangan, yang menjadi tujuan utama dari kebijakan makroprudensial. Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia maka akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi seiring perkembangan perekonomian tersebut. Dengan banyaknya resiko yang semakin berkembang tersebut, maka tentunya akan mengganggu kinerja perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, istilah makroprudensial secara implisit telah digunakan sejak awal tahun 2000 sebagai respons atas krisis keuangan tahun 1997/1998, yang ditandai dengan penyusunan kerangka stabilitas sistem keuangan Indonesia dan pembentukan Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK) di Bank Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui dua pendekatan, yaitu makroprudensial dan mikroprudensial (BI, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2000, Bank Indonesia telah memerhatikan aspek makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia di bidang makroprudensial tertuang dalam Undang- Undang (UU) Republik Indonesia No. 21

Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian yang dilakukan di BIS, Swiss, kebijakan makroprudensial didefinisikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik (Galati G., and Richhild M., 2011). Penjelasan serupa disampaikan oleh IMF, yang mendefinisikan makroprudensial sebagai kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik (IMF, 2011).

Kebijakan makroprudential dapat dijelaskan dengan maksud, yaitu diterapkan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, diterapkan dengan berorientasi pada sistem keuangan secara keseluruhan (*system-wide perspectives*), dan diterapkan melalui upaya membatasi terbangunnya (*build-up*) risiko sistemik. Secara sederhana kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi.

2.1.2 Tujuan Kebijakan Makroprudential

Tujuan kebijakan makroprudensial merupakan instrumen yang digunakan BI untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Antara lain *counter cyclical buffer* (CCB), *Counter cyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Salah satu tujuan kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) adalah untuk mencegah timbulnya dan/atau meningkatnya risiko sistemik yang berasal dari pertumbuhan kredit yang berlebihan (*excessive credit growth*). Hal ini terkait dengan penyaluran kredit perbankan yakni meningkat saat periode ekonomi ekspansi (*boom*) dan melambat pada periode ekonomi kontraksi (*bust*). Kebijakan CCB perlu untuk diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklikalitas antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi. Besaran *Countercyclical Buffer* bersifat dinamis yaitu berkisar antara 0% sampai dengan 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank. Bank Indonesia akan melakukan evaluasi besaran *Countercyclical Buffer* tersebut secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Kebijakan berjalan seiringa dari ketentuan permodalan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan akan memperkuat daya tahan perbankan.

Rasio intermediasi makro dan penyangga likuiditas makro (PLM). PLM adalah instrumen makroprudensial berbasis likuiditas yang bersifat *countercyclical* dan *time varying*.

PLM merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yaitu GWM, yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan risiko likuiditas perbankan. PLM ini adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan. PLM dalam kondisi tertentu dari 4% itu sebesar 2% bisa dicairkan, sedangkan dana yang didapat dari pihak ketiga (DPK). Apabila keadaan *overheating* maka instrumen makroprudensial bisa diketatkan. Kebalikannya, apabila kondisi ekonomi sedang turun maka BI bisa melonggarkan. Sehingga BI bisa melakukan kebijakan pengetatan atau pelonggaran sewaktu-waktu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan makroprudensial untuk meminimalkan risiko sistemik merupakan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan yang mencakup seluruh elemen sistem keuangan dengan tetap memerhatikan kondisi makroekonomi. Sementara itu, kinerja dan tingkat kesehatan setiap institusi keuangan tidak lagi menjadi syarat perlu apabila kegagalan atau risiko pada satu atau beberapa institusi keuangan tidak menimbulkan dampak yang signifikan (sistemik) terhadap sistem keuangan.

2.1.3 Konsep Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia (BI) secara implisit telah menerapkan pendekatan makroprudensial sejak tahun 2000, ditandai dengan berdirinya Biro Stabilitas Sistem Keuangan dalam struktur organisasi BI. Fungsi dan kewenangan BI itu kemudian dipertegas UU No 21/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seiring dengan pengalihan kebijakan mikroprudensial (pengaturan dan pengawasan perbankan) ke OJK pada akhir Desember 2013.

Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan. Karena itu, fokus kebijakan tidak hanya pada lembaga keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga dan infrastruktur keuangan. Adapun kebijakan mikroprudensial ditujukan untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan secara individu saja.

Gambar 2.1 : Desain dan Implementasi Kebijakan Makroprudensial

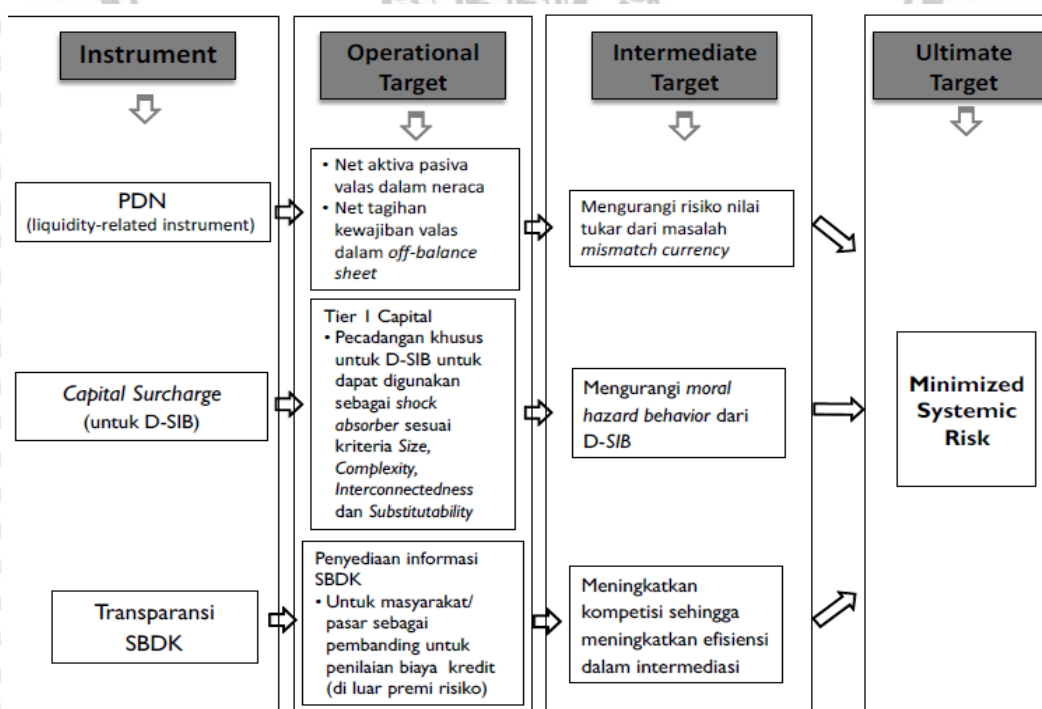


Sumber : Press – Training Of Trainer Makroprudensial, 2014

2.1.4 Jenis Dan Pembahasan Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial memiliki beberapa jenis atau instrument untuk mengetahui angka atau nilai guna menetapkan kebijakan tersebut stabil atau tidak. Yang harapannya mampu meminimalisir risiko dengan upaya mencapai stabilitas sitem keuangan, yang digambarkan oleh kerangka berikut ini (**Gambar. 2.1.4**)

Gambar 2.2 : Transmisi Kebijakan Makroprudensial



Sumber : Bank Indonesia, 2017

Adapun beberapa instrument dari kebijakan makroprudensial akan dibahas satu persatu, dengan penjelasan sebagai berikut :

2.1.4.1 Giro Wajib Minum (GWM LFR)

Bank Indonesia memperkenalkan instrumen kebijakan makroprudensial yaitu Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM d/h. GWM LFR) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM d/h. GWM Sekunder) yang merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermediasi perbankan. Instrumen kebijakan RIM diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Sedangkan dengan instrumen kebijakan PLM, diharapkan dapat mengatasi risiko likuiditas perbankan mengingat risiko likuiditas ini mampu mengamplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik. Kebijakan ini juga diimplementasikan pada perbankan syariah sehingga dapat memperkuat intermediasi dan meningkatkan ketahanan perbankan syariah (RIM Syariah dan PLM Syariah). Instrumen kebijakan makroprudensial ini bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

2.1.4.2 Loan To Value (LTV)

Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral memberikan persyaratan mengenai angka rasio LTV yang wajar bagi setiap bank. Adapun angka rasio LTV ini dibandingkan dengan masing-masing tipe rumah yang ditawarkan masing-masing pihak bank. Secara umum, per penetapan peraturan Nomor 17/PBI/2015 tentang rasio LTV, ada 3 tier kebijakan BI mengenai LTV, yang berturut-turut dinamai LTV I, II, dan III.

Kebijakan LTV I masing-masing didasari oleh Surat Edaran (SE) BI No. 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 dan SE BI No. 14/33/DPbS per 27 November 2012, di mana dalam kebijakan LTV ini, BI menetapkan angka maksimum 70% untuk rasio LTV sebagai rasio pembiayaan kredit konvensional maupun syariah, kecuali apabila kredit tersebut adalah program dari pemerintah Indonesia.

Pada kebijakan LTV II yang dirumuskan pada SE BI No. 15/40/DKMP per 23 September 2013, pertimbangan dasar rasio LTV ditetapkan atas tujuan kredit dan tipe rumah agunan. Secara umum, angka maksimum kebijakan LTV II berkisar antara 50% hingga 90% tergantung dari tujuan kredit rumah dan jenis rumah (mulai dari ruko/rukan hingga rumah tipe di atas tipe 70).

Kemudian, kebijakan LTV III sebagaimana dirumuskan pada PBI No. 17 Tahun 2015 merupakan penyempurnaan dari kebijakan LTV II sebelumnya. Dalam penyempurnaan ini, rumah yang dipakai dasar agunan secara lebih spesifik dikategorikan menurut jenisnya (tapak, susun, atau ruko/rukan), tipe rumah (antara tipe 21-70), dan tujuan pembiayaannya (mulai dari MMQ, IMBT, hingga murabahah). Di sini pula batas maksimum rasio LTV naik dibandingkan tier sebelumnya, yakni sebesar 65% hingga 90%. Bila melihat pada urutan-urutan demikian, kita akan mengetahui BI selalu berupaya memperbaharui kebijakan mengenai dasar perhitungan dan batas maksimum LTV ini. Upaya perbaharuan kebijakan ini umumnya didasari atas dasar pengawasan pada pembiayaan yang berkaitan dengan perumahan, sehingga persoalan keuangan apapun yang melilit sektor properti dapat terselesaikan dengan tertib.

2.1.4.3 Net Open Position (NOP)

Net Open Position (NOP) adalah salah satu instrumen yang berhubungan dengan pengaturan nilai tukar. Salah satu tugas dari kebijakan makroprudensial adalah dengan mengontrol capital inflow, dimana ketika capital inflow masuk ke Indonesia maka akan otomatis meningkatkan permintaan agregat buruknya, inflasi juga berhubungan positif disitu. Apabila permintaan agregat meningkat akan meningkatkan tingkat inflasi juga. Dan selain itu, kredit di Indonesia juga akan tumbuh. Tumbuhnya kredit ini nantinya akan menyebabkan tingginya harga aset yang nantinya berdampak pada kerentanan keuangan. Peningkatan harga aset ini nantinya akan menaikkan tingkat suku bunga. Dengan meningkatnya suku bunga, justru akan menambah capital inflow. Positifnya modal asing yang masuk nantinya akan menambah kepercayaan pasar karena investor optimis terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Negatifnya adalah ketika modal asing yang masuk terlalu berlebihan maka akan menyebabkan apresiasi terhadap nilai tukar. Dengan masuknya modal asing ini juga akan menyebabkan harga aset mengalami peningkatan dan khawatir akan menyebabkan resiko krisis. Hal ini akan dikontrol dengan adanya instrumen Net Open Position (NOP). Adanya NOP ini adalah untuk mengontrol serta mengendalikan aliran modal asing yang masuk dalam jangka pendek yang selalu berfluktuatif. Selain itu adanya NOP ini juga membatasi adanya objek yang rentan terhadap krisis (eksposur) bank terhadap nilai tukar akibat masuknya modal asing.

2.2 Kebijakan Mikroprudential Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting untuk menjalankan tugas mikroprudensialnya yaitu melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan. Dengan adanya kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial maka diharapkan sistem keuangan Indonesia dapat tetap stabil serta lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya mampu bekerjasama dengan baik dan tidak mengutamakan kepentingan dari lembaganya yang dapat mengancam kestabilan lembaga dan perekonomian. Pasal 4 UU No. 21 tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan perbankan.

2.2.1 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kebijakan Mikroprudential

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika dilihat dari Pasal 6 UUUJK adalah lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank,
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank,
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
- d. pemeriksaan bank, ini merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Kewenangan Lembaga OJK salah satunya adalah kewenangan yang terdapat pada Pasal 7, dalam hal ini melaksanakan suatu tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, untuk pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank sendiri yaitu :

- a) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

b) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

2.2.2 Jenis Dan Pembahasan Kebijakan Mikroprudential

Adanya risiko akibat adanya kegagalan sistem keuangan, kegagalan regulasi dan adanya risiko sistemik yang mengancam bank dan lembaga keuangannya lainnya. Diperlukan adanya kebijakan yang mengatur atau mengukur tingkat kinerja dan kesehatan masing individu lembaga keuangan, agar tiap tiap individu bank dan lembaga keuangan lain lebih terkontrol untuk memitigasi adanya risiko sistemik, yang mengganggu jalannya stabilitas sistem keuangan. Kebijakan mikroprudential ini memiliki berbagai instrument, untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, anantara lain :

2.2.2.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.

CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

2.2.2.2 Beban Operasioanl Pendapatan Operasioanl (BOPO)

BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Belanja operasional adalah biaya bunga yang diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi. BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$BOPO = \frac{\text{Belanja Nasional}}{\text{Pendapatan Nasional}} \times 100\%$$

2.2.2.3 Loan To Deposit Ratio (LDR)

LDR (*Loan to Deposits Ratio*) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (bisa disebut likuiditas) dengan membagi total kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur). Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai LDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. LDR dapat dihitung dengan cara:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.2.4 Return Off Assets (ROA)

ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba (bisa disebut profitabilitas) dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Rumus untuk menghitung ROA yakni:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.2.5 Non Performing Loan (NPL)

Non performing loan (NPL) adalah perbandingan kredit yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur, atau biasa disebut dengan kredit macet, dengan total kredit yang disalurkan bank ke masyarakat. Maka jika nilai NPL semakin tinggi maka, kredit macet yang ada di bank semakin besar jumlahnya, sehingga tingginya nilai NPL menyebabkan kerugian yang akan dialami oleh perbankan. Menghitung nilai NPL dapat dirumuskan sebagai berikut

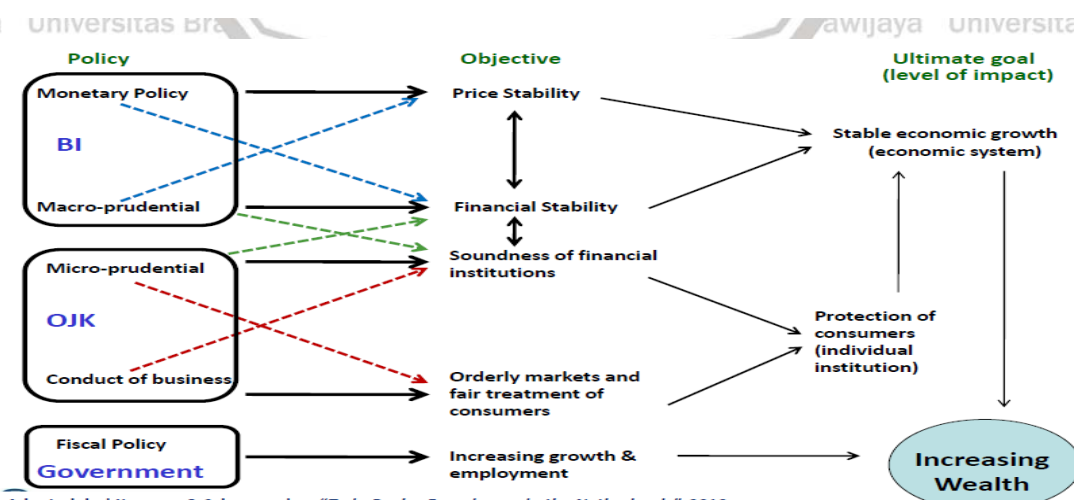
$$NPL = \frac{\text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

2.3 Hubungan Kebijakan Makroprudential Dan Kebijakan Mikroprudential

Stabilitas sistem keuangan, yang menjadi tujuan utama dari kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, stabilitas system keuangan memiliki peran penting terhadap perekonomian di Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia maka akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi seiring perkembangan perekonomian tersebut. Dengan banyaknya resiko yang semakin berkembang tersebut, maka tentunya akan mengganggu kinerja perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya stabilitas sistem keuangan maka akan meminimalkan resiko yang ditimbulkan dari perkembangan perekonomian yang ada.

Tugas dan fungsi stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menganalisis perkembangan dan menilai risiko, guna menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan, Latumaerissa (2013). Untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tangguh perlu dimonitoring terhadap gejala – gejala yang menimbulkan krisis, termasuk melakukan pemeriksaan secara reguler apakah potensi risiko tersebut berdampak terhadap ketahanan keuangan, untuk melakukan pendekatan tersebut maka dibutuhkan kebijakan makroprudential dan mikroprudential. Kedua kebijakan tersebut memiliki satu kesamaan yaitu dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang stabil, namun memiliki tugas, kewenangan dan instrument yang berbeda dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.

Gambar 2.3 : Hubungan Kebijakan Makroprudential Dan Mikroprudential



Sumber : Bank Indonesia, 2017

Hubungan antara kedua kebijakan tersebut, akan meminimalisir potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).

2.3.1 Mandat Bank Indonesia Terhadap Perbedaan Kebijakan Makroprudential dan Kebijakan Mikroprudential

Kebijakan makroprudensial dan mikroprudential adalah kebijakan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya risiko sistemik. Oleh karena itu, waktu (*timing*) perumusan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting, termasuk menentukan waktu yang tepat untuk aktivasi/ deaktivasi suatu instrumen kebijakan. Implementasi instrumen kebijakan yang terlalu cepat atau lambat berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan, atau bahkan dapat menimbulkan biaya regulasi atau *unnecessary regulatory cost* (CGFS, 2012). Fungsi bank sentral sebagai otoritas makroprudensial erat kaitannya dengan fungsi klasik bank sentral sebagai LoLR. Tugas bank sentral memiliki fungsi *Lender of the Last Resort* yang berarti bank sentral adalah lembaga terakhir yang bersedia memberikan pinjaman dalam kondisi lembaga lain tidak mau atau tidak sanggup lagi memberikan pinjaman. Fungsi ini dikaitkan juga dengan fungsi bank sentral sebagai pencipta uang.

Tabel 2.1 : Perbedaan Kebijakan Makroprudential dan Mikroprudential

Aspek	Kebijakan Makroprudential	Kebijakan Mikroprudential
Tujuan	Mencegah instabilitas untuk menghindari biaya perokonomian yang timbul dari kegagalan sektor keuangan. (biaya penanggulangan krisis)	Mencegah instabilitas dengan cara menekan kerugian yang ditanggung oleh institusi keuangan, serta bermuara pada peerlindungan konsumen
Fokus Kebijakan	Berorientasi pada sistem,	Berorientasi pada tingkat

	melihat sistem keuangan secara keseluruhan melalui pendekatan yang bersifat <i>top - down</i>	kesehatan individu institusi keuangan melalui pendekatan yang bersifat <i>bottom - up</i>
Proses Identifikasi Risiko dan Perumusan Kebijakan	Menggunakan acuan dimensi runtun waktu (<i>time series</i>) dan antar subject (<i>cross section</i>)	Menggunakan acuan dimensi antar subjek (<i>cross section</i>)
Waktu Perumusan Dan Implementasi	Kebijakan bersifat <i>time varying</i> atau fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan siklus yang terjadi. Sebagai contoh aktivasi LTV bagi	Kebijakan yang tidak bersifat <i>time varying</i> , sebagai contoh instrument mikroprudential rasio kecukupan modal
Aspek	Kebijakan Makroprudential	Kebijakan Mikroprudential
Instrument	Kredit properti yang dapat disesuaikan dengan siklus pertumbuhan kredit di sektor properti	(CAR) minimum bank sebesar 8 %. dalam kondisi siklus perekonomian apapun, bank tetap harus tetap menjaga rasio CAR

Sumber : ToT BINs – Kelembagaan Bank Sentral rev2, 2017

2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

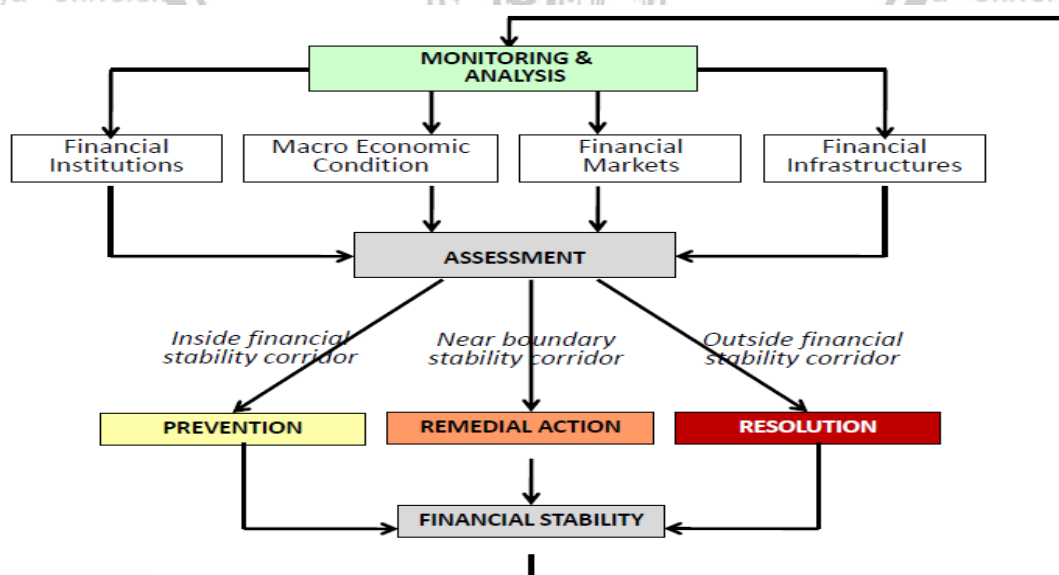
Stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.

Stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

2.5 : Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan



Sumber : Bank Indonesia , 2017

Sistem keuangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai lembaga keuangan. Untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang baik antara bank sentral dengan otoritas jasa keuangan, yang memiliki kebijakan masing-masing yaitu kebijakan makroprudential dan mikroprudential. Perbedaan kewenangan antara kedua kebijakan tersebut, memerlukan adanya pembagian kewenangan dan tugas yang jelas, agar tidak terjadi gesekan kepentingan antara bank sentral dan otoritas jasa keuangan demi terwujudnya stabilitas sistem keuangan.

2.5 Implementasi Kebijakan Makroprudential Dan Mikroprudential Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan harus turut serta dibarengi dengan implementasi baruan kebijakan yang bekerja secara efektif dan efisien. Keberhasilan menjaga stabilitas moneter tanpa tanpa adanya keberhasilan stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, begitu pula sebaliknya stabilitas sistem keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak akan berjalan dengan normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya sistem keuangan.

Gambar 2.5. : Implementasi Kebijakan Makroprudential Dan Mikroprudential

	KEMENTERIAN KEUANGAN	BANK INDONESIA	OJK	LPS
Ketahanan (resilience)	Kebijakan fiskal untuk resolusi bank berdampak sistemik	Pengaturan dan pengawasan bank sistemik (<i>systemic surveillance</i>)	Pengaturan dan pengawasan individual bank, LKBB, pasar modal (<i>individual surveillance</i>)	Resolusi bank dan LKBB
Intermediasi	Kebijakan fiskal untuk mendorong intermediasi	Kebijakan makroprudensial (industri dan makro)	Kebijakan mikroprudensial (kelembagaan)	Kebijakan premi risiko bank
Efisiensi	Kebijakan fiskal untuk mendorong efisiensi	Pengembangan pasar keuangan: • Pasar uang antar bank (Rupiah dan valas) • Pasar dana dan kredit perbankan • Pasar keuangan jangka pendek (CPs, PNs)	Pengembangan pasar keuangan: • Pasar modal (saham dan obligasi) • Pasar keuangan jangka menengah (MTNs)	Kebijakan maksimum suku bunga penjaminan

Sumber : Bank Indonesia, 2017

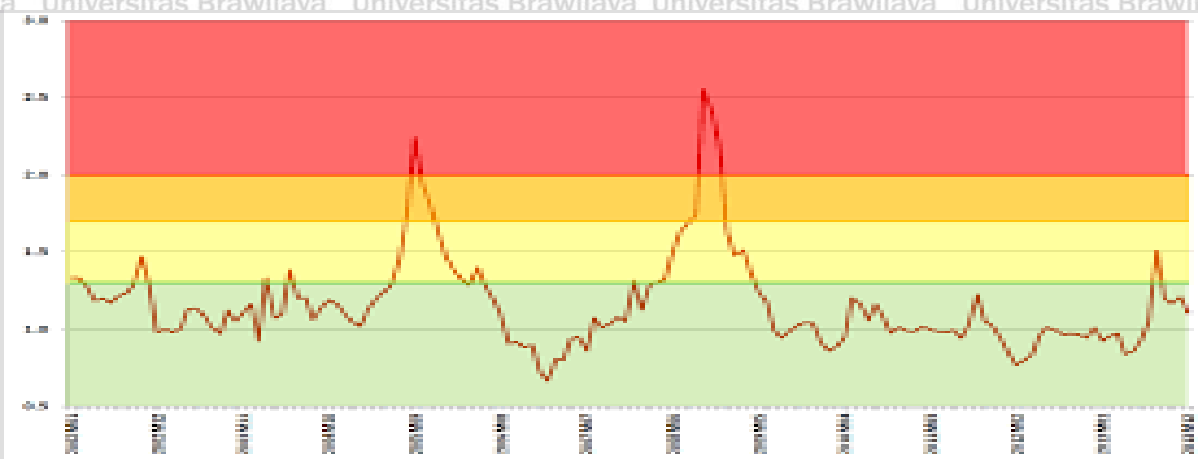
Stabilitas sistem keuangan (SSK) pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, ketika sistem keuangan sedang berada dalam kondisi tidak stabil. Suatu sistem keuangan dikatakan tidak stabil adalah pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat perekonomian (Budisantoso, 2014). Upaya untuk meminimalisir dan memitigasi adanya risiko sistemik yang dapat merusak sistem perekonomian dikendalikan oleh :

1. Otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai pengawas individu perbankan. Menilai adanya atau tidaknya kegagalan sistem regulasi bank dan lembaga keuangan lainnya secara individu.
2. Pengawasan secara makroprudential oleh Bank Sentral untuk mengawasi apakah adanya gejolak atau *shock*, yang terjadi hingga menimbulkan permasalahan risiko sistemik yang mengakibatkan kegagalan regulasi bank dan lembaga keuangan secara keseluruhan
3. Apabila, kedua kebijakan tersebut dinilai kurang mampu untuk menangani adanya risiko sistemik maka, permasalahan perbankan akan di bentengi oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), dalam upaya menjaga likuiditas perbankan agar tidak sampai terjadi kegagalan sistem regulasi. Maka, bank atau lembaga keuangan akan diberikan suntikan atau pinjaman dana untuk menggulangi permasalahan tersebut.
4. Pemerintah sebagai penjaga gawang terakhir, sistem keuangan yang terjadi guncangan. Guncangan tersebut sudah tidak dapat dibentengi dengan diberlakukannya dua kebijakan dan adanya suntikan dana dari LPS.

2.6 Peran Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Perekonomian

Pada saat ini krisis tahun 2005, ISSK mengalami peningkatan. Selang tiga tahun setelahnya, ISSK mengalami lonjakan yang tajam. Tercatat pada tahun tersebut, ISSK Indonesia mencapai 2,6. Namun, hal ini berbeda pada tahun 2014/2015 saat itu Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi. Pada tahun tersebut nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dollar hingga mencapai 14.000 rupiah per dollar AS. Namun, pelemahan nilai tukar tersebut ternyata tidak mempengaruhi ISSK di tahun 2014/2015. Pelemahan nilai tukar tersebut tidak membuat ISSK melonjak, tetapi ISSK menunjukkan penurunan hingga pada akhir tahun 2015. Tercatat pada tahun 2005 dan 2008 ISSK mengalami lonjakan yang tajam. Namun, lonjakan ini ternyata tidak mempengaruhi perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2014/2015

Gambar 2.6 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia



Sumber : Bank Indonesia, 2016

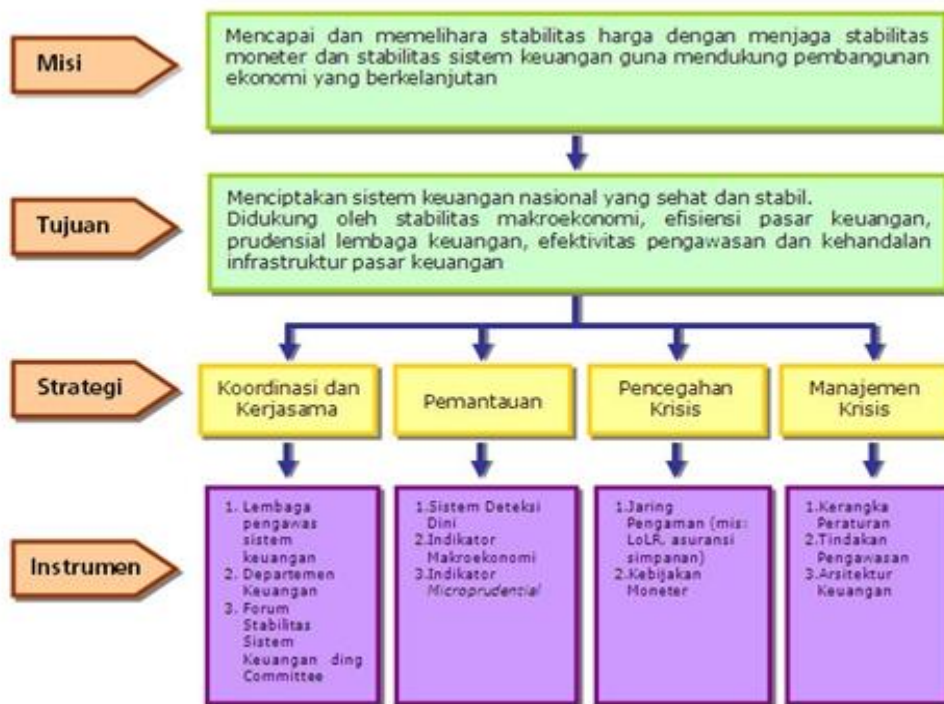
Stabilitas sistem keuangan dapat terwujud ketika sistem keuangan dalam suatu negara kuat dan tahan terhadap gangguan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan dapat dilihat dari dua hal. Pertama, dilihat melalui institusi yang stabil. Hal ini diamati dari adanya bank atau lembaga keuangan yang collapse dan dipertaruhkan kredibilitasnya oleh masyarakat luas. Kedua, dapat dilihat melalui kondisi pasar yang stabil. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Penetapan harga, alokasi dana, serta pengelolaan risiko dapat mendukung pertumbuhan ekonomi guna menciptakan stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Dengan begitu negara tetap dapat menjalankan sistem intermediasi, melakukan kegiatan pembayaran dan mengendalikan risiko dengan baik.

Selain itu, faktor-faktor yang dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan :

1. Lingkungan ekonomi yang stabil
2. Lembaga keuangan yang dikelola dengan baik
3. Pengawasan institusi keuangan yang efektif
4. Sistem pembayaran yang aman dan handal.

keempat faktor tersebut saling mempengaruhi antara satu faktor terhadap faktor lainnya. Maka, bila terdapat tekanan pada salah satu faktor maka akan berdampak pada salah satu faktor lainnya, atau bisa saja berdampak pada seluruh faktor yang ada. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian di negara manapun, tidak terkecuali Indonesia

Gambar 2.7 : Framework Stabilitas Sistem Keuangan



Sumber : Bank Indonesia, 2016

Mengetahui pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian Indonesia, diperlukan strategi untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Karenanya, Bank Indonesia menjalankan empat strategi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu :

1. Pemantapan regulasi dan standart
2. Peningkatan riset dan surveillance
3. Peningkatan kondisi dan kerjasama
4. Pemantapan jaring pengaman dan penyelesaian krisis

Dengan menjalankan strategi diatas diharapkan sistem keuangan di Indonesia dapat berjalan stabil, sehingga dapat memebentuk pasar yang sehat, terkontrol dan dapat

mengalokasikan berbagai sumber daya yang ada secara optimal. Selain itu, kesehatan perbankan juga dapat menjalankan fungsinya sebagai penyalur dan penghimpun dana secara maksimal ketika stabilitas sistem keuangan dapat terwujud.

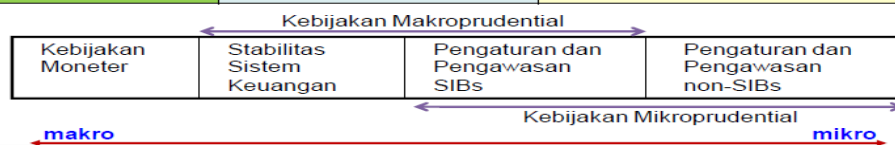
Tak hanya berdampak pada pasar dan perbankan, stabilnya sistem keuangan turut mempengaruhi perputaran jumlah uang yang beredar (JUB) di masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem keuangan yang berjalan dengan baik mengakibatkan inflasi yang dapat dikembalikan. Selain itu, biaya dari instabilitas sistem keuanganpun dapat ditekan. ketika sistem keuangan tidak stabil maka pengaruh dari instabilitas tersebut menyerang langsung sektor keuangan yang mempunyai biaya restrukturisasi yang tidak murah, seperti sektor perbankan.

2.7 Makroprudential dan Mikroprudential Sebagai Indikator Pengukuran Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan

Pemantauan terhadap stabilitas sistem keuangan yang tengah berjalan, penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar dapat mengukur tekanan risiko yang akan timbul. Khususnya, gangguan yang bersifat sistemik dan dapat menciptakan krisis. Risiko sistemik itu sendiri adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan, karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*). Indikator utama yang digunakan untuk target pemantauan ada dua, yaitu kebijakan makroprudential dan mikroprudential. Kedua indikator kebijakan tersebut saling melengkapi sebagai aksi dan reaksi dalam sistem perekonomian.

Gambar 2.8 : Konsep Stabilitas Sistem Keuangan

	Makroprudensial	Mikroprudensial
Tujuan Antara	Pemantauan dan penilaian terhadap sistem keuangan secara keseluruhan	Pemantauan dan penilaian terhadap kesehatan individu lembaga keuangan
Tujuan Akhir	Menekan biaya krisis (penurunan PDB)	Perlindungan konsumen
Model Risiko	Sebagian endogen	Eksogen
Korelasi & eksposur lintas lembaga keuangan (<i>contagion</i>)	Penting	Tidak relevan
Kalibrasi kebijakan prudensial	Fokus pada risiko sistemik; Top down	Fokus pada risiko individual lembaga keuangan; Bottom up
Fokus	Lembaga keuangan sistemik (Systemically Important Financial Institution/SIFIs)	Individu Lembaga keuangan



Sumber : Bank Indonesia, 2016

Cakupan indikator kebijakan mikroprudential, pemantauan kondisi stabilitas sistem keuangan dilakukan terhadap kondisi mikro institusi. Perbankan, sebagai salah satu institusi keuangan, merupakan sektor yang termasuk mikroprudential. Melalui pemantauan yang dilakukan terhadap perbankan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan rentabilitas institusi keuangan dapat diketahui dalam mengukur konsep risiko pada perspektif mikroprudential, risiko diukur dari tingkat kesehatan dan kinerja keuangan.

Selain dilihat melalui indikator mikroprudential, pemantauan stabilitas sistem keuangan juga dilakukan pada perspektif makroprudential. Pemantauan indikator makroprudential ini dilakukan terhadap kondisi sistem keuangan secara keseluruhan, sebagai kumpulan individu lembaga keuangan. Pada perspektif ini, risiko diukur dari spillover dampak dan biaya yang ditimbulkan termasuk interaksi dengan makroekonomi. Kesehatan dan kinerja dari institusi keuangan tidak lagi menjadi syarat dari stabilitas sistem keuangan apabila kegagalan/risiko pada suatu atau beberapa institusi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sistem keuangan. Dengan melihat kedua hal ini, pemerintah dapat melihat pergerakan domestik maupun internasional yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan pada suatu negara. Menurut Borio (2009), kebijakan makroprudential membatasi tekanan/risiko sistematis secara luas, biaya yang besar apabila terjadi instabilitas di sistem keuangan. Maka, ketika kedua kebijakan ini tidak dilakukan maka akan menyebabkan risiko sistematis yakni potensi instabilitas sistem keuangan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hubungan antara kebijakan makroprudential dengan kebijakan mikroprudential sejauh ini belum banyak yang melakukan penelitian, adapun penelitian terdahulu sebagai referensi yaitu :

1. Nada Blahova (2015) judul penelitian *"The Relation Between Macroprudential Policy And Microprudential Policy An Example Bank As Regulatory Capital."* Penelitian tersebut menggunakan analisis *metode regulatory capital*. Hasilnya penelitian ini menunjukkan masalah utama makroprudential adalah tentang prosiklikalitas bank yang akan berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga dibutuhkan kebijakan mikroprudential dalam mengurangi perilaku prosiklikalitas bank. Berdasarkan analisis struktur modal dan pengembangan kebutuhan modal bahwa pendekatan makroprudential dan kebijakan mikroprudential tidak dapat dipisahkan atau saling berhubungan antara satu sama lain. *Journal economy university of economics, prague. Czech republik.*
2. Larry D Wall (2015), judul penelitian. *"stricter microprudential supervision versus macroprudential supervision."* Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan

pengawasan secara makroprudential diakibatkan oleh krisis berdampak pada peningkatan pengawasan mikroprudential sehingga meningkatkan efisien perusahaan yang di anggap penting. *Journal of financial regulation and compliance, USA*.

3. Ayu Swaninggurum dan Peggy Hariawan (2014) judul penelitian. "evaluasi efektifitas instrument makroprudential dalam mengurangi risiko sistematis di Indonesia." Penelitian tersebut menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian yaitu variabel proksi kebijakan makroprudensial.

4. Persaud, A. D. (2012) dengan judul "*Micro And Macro Prudential Instrument Of Global Finance Stability*." Stabilitas sistem keuangan dapat dilihat dari dua dimensi. Dimensi pertama adalah kondisi perbankan, sistem keuangan dikatakan stabil apabila perbankan dalam kondisi yang baik. Menurutnya, bank pada kondisi yang baik ketika bank yang bersangkutan mampu melakukan transaksi keuangan dengan baik dan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Dimensi kedua adalah stabilitas pasar keuangan. Stabil atau tidaknya pasar keuangan domestik tidak terlepas dari pengaruh pasar keuangan global. Arus modal keluar akan terjadi apabila pasar keuangan domestik tidak memberikan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan di pasar keuangan global. Jika dana yang keluar dari pasar keuangan domestik sangat besar jumlahnya maka hal tersebut akan mempengaruhi kestabilan pasar keuangan domestik. Terganggunya stabilitas pasar keuangan yang disebabkan oleh capital flight memiliki resiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

5. Husein Umar (2003) dengan judul "*Bussines of Introduction financial stability theory*". Dalam penelitiannya menyatakan, sistem keuangan merupakan sebuah sistem yang berperan utama dalam menjembatani mobilisasi dana antara pihak yang berkelebihan dana (surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit) melalui lembaga keuangan, hingga terwujudnya stabilitas sistem keuangan. Karena adanya suntikan dana, yang menopang adanya kegagalan regulasi lembaga keuangan tersebut.

6. Cludio Borio (2014) dengan judul "*The Financial Cycle and Macroeconomics*". Dalam penelitiannya menyebutkan sistem keuangan merupakan hal yang tepat untuk melihat pergerakan kredit. Sistem keuangan memiliki rentang waktu yang panjang dan amplitudo yang panjang, sehingga memungkinkan untuk melihat atau mengidentifikasi risiko krisis keuangan dimasa depan secara real time. Model sistem keuangan menimbulkan tantangan terhadap paradigma yang tengah berlaku dimana para pelaku keuangan, tidak hanya mengalokasikan sumber daya tetapi juga menghasilkan daya beli yang dapat menimbulkan instabilitas sistem keuangan.

7. Sinclair, P. N. (2000) dengan judul "*Central Bank and Financial Stability Bank*". Dalam penelitiannya menyatakan bahwa, stabilitas keuangan telah lama menjadi landasan

kebijakan publik secara umum dan kebijakan bank sentral pada khususnya. Hal ini, mendahului stabilitas moneter sebagai tujuan bank sentral. Disebagian besar negara, termasuk di Amerika Serikat dan Inggris. Beberapa tahun terakhir terdapat pendalaman dan penguatan fokus kebijakan publik pada masalah stabilitas keuangan. Dalam lingkungan stabilitas moneter, peristiwa-peristiwa stabilitas keuangan seperti itu bisa terjadi dan lebih cepat di masa depan daripada di masa lalu.

8. M. Edhie Purnawan & m. Abd. Nasir (2015) dalam judul *"The Role Of Macroprudential Policy To Manage Exchange Rate Volatility, Excess Banking And Credit"*. Penelitian menggunakan metode event analisis hasil penelitiannya yaitu kebijakan makroprudential melalui kebijakan *one month holding* (OMH), NOP, GWM, LDR, GWM LDR, dan GWM primer cukup efektif untuk mengatasi interaksi antara sistem keuangan dan ekonomi riil yang saling menguatkan.
9. Pasricha et al. (2013) dalam judul *"Assesing Financial System Vulnerabilities: An Early Warning Approach"*. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tingkatan. Tingkat pertama mendeteksi imbalance (mendeteksi kerentanan) yang terjadi pada sistem keuangan. Pada tahap yang kedua, memperkirakan kemungkinan tekanan pada sistem keuangan dengan melihat ketidak seimbangan (imbalance) pada sistem keuangan. Tahap terakhir memperkirakan dampak dari beberapa tekanan potensial yang pernah terjadi pada sistem keuangan dan ekonomi riil (analisis dampak atau stress testing). Model mengidentifikasi kerentanan pada sistem finansial dengan membandingkan ekonomi periode – periode yang lalu yang menunjukkan financial stress.
10. J. Huotari (2015) dalam judul *"commercial bank management : manajemen terhadap regulasi stabilitas perbankan"*. Dalam menjaga kestabilan sistem keuangan bank central maupun lembaga - lembaga keuangan perlu memiliki alat bantu atau indikator untuk melihat posisi sistem keuangan. Semua peserta di pasar keuangan membutuhkan alat atau indikator untuk memantau fungsi pasar keuangan, untuk mendeteksi terjadi peristiwa risiko sistemik yang tidak mudah dihindari oleh individu atau sector. Oleh karena itu majemen perbankan memiliki manfaat yang jelas untuk memantau fungsi pasar keuangan.

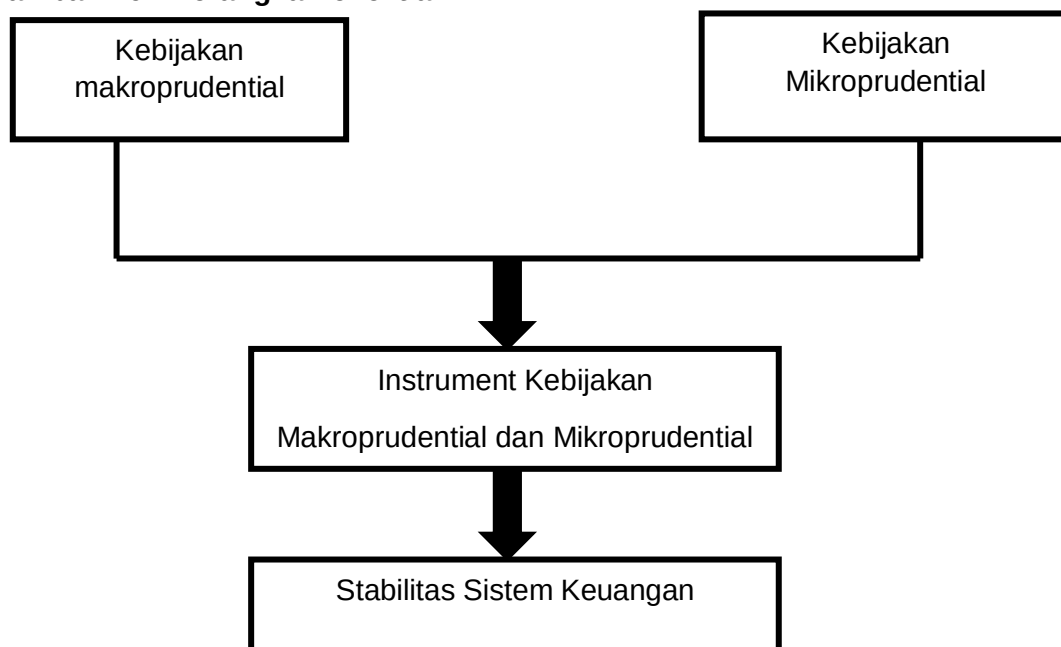
2.9 Kerangka Penelitian

Stabilitas sistem keuangan keuangan sangat diperluka dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan sistem keuangan menimbulkan dampak yang buruk bagi perekonomian, seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Ketidakstabilan sitem keuangan juga berdampak pada arus dana seperti pelaku ekonomi seperti investor dan lembaga keuangan. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan

kepada masyarakat kepada lembaga keuangan. oleh karena itu perlu adanya stabilitas sistem keuangan untuk menjaga perekonomian publik juga menghindari adanya risiko sistemik pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Pemeliharaan sistem keuangan diwujudkan dengan adanya implementasi dari kebijakan makroprudential dan mikroprudential. Dengan demikian, fungsi intermediasi berjalan seimbang, pencegahan timbulnya risiko sistemik dapat berjalan, serta dapat meningkatkan efisiensi sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan memungkinkan suatu keuangan berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentan eksternal dan internal, sehingga alokasi sumber pendapatan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Ruang lingkup masalah yang dihadapi dalam stabilitas sistem keuangan adalah pertumbuhan kredit, kecukupan modal, keberlangsungan lembaga keuangan bank sebagai lembaga intermediasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, instrument kebijakan makroprudential antara lain Loan to Value (LTV), GWM LFR dan Net Open Position (NOP), serta instrument kebijakan mikroprudential seperti, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan LDR. Implementasi dari kebijakan makroprudential dan mikroprudential menjaga stabilitas sistem keuangan, dituliskan dalam kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.9 : Kerangka Penelitian



Sumber : Ilustrasi Penulis, 2019

Dari kerangka pemikiran diatas dan penelitian sebelumnya bahwa kebijakan makroprudential dan kebijakan mikroprudential sifatnya saling berhubungan dan saling

memberikan pengaruh, terhadap terwujudnya stabilitas sistem keuangan dengan berbagai instrument yang dimiliki antara kedua kebijakan tersebut. Menurut beberapa peneliti menyatakan bahwa kebijakan makroprudential dengan mikroprudential saling memberikan pengaruh. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wall (2015) yang menyatakan bahwa ketika adanya pengawasan secara makroprudential akibat krisis keuangan, berdampak pada peningkatan terhadap pengawasan mikroprudensial.

Kebijakan Giro Wajib Minimum yang dikeluarkan Bank Indonesia memiliki tujuan sebagai penyanggalikuiditas bank. Apabila nilai GWM naik tujuan adalah untuk mengurangi kapasitas kredit perbankan. Sebaliknya, apabila diturunkan tujuannya adalah menambah kapasitas kredit dan GWM dapat mempengaruhi suku bunga. Menurut *Working Paper* Bank Indonesia (2012) tentang pertumbuhan kredit optimal dan kebijakan makroprudential untuk pengendalian kredit bahwa kebijakan GWM berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit di Indonesia. Peningkatan GWM akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan kredit perbankan dan sebaliknya, penurunan nilai GWM akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan kredit perbankan.

Kebijakan Loan To Value (LTV) bertujuan untuk meningkatkan aspek prudential bank dalam penyaluran kredit perumahan dan properti. Apabila permintaan akan kredit perumahan maupun properti meningkat akibat permintaan yang tinggi secara terus menerus dapat menimbulkan kenaikan harga yang cukup bayar (kredit macet) oleh masyarakat yang mengirimkan kredit perumahan oleh lembaga keuangan.

2.10 Hipotesis Penelitian

Ada pengaruh secara signifikan antara kebijakan makroprudential dan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bersifat deduktif dengan mengukur fenomena dengan ketepatan variabel dan melakukan pengujian hipotesis. Penelitian yang cenderung menghasilkan hipotesis tidak mampu menghasilkan temuan yang menyeluruh atau besar (Draft, 1983). Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada data – data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Suryana, 2010). Pendekatan kuantitatif bertujuan menguji hipotesis mengenai fenomena tertentu, menggunakan sistem yang lebih kaku, format pertanyaan yang tertutup dan menggunakan metode yang akurat (Mack et al, 2005).

Penelitian ini bersifat kausal komparatif, yaitu mempunyai tujuan untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya hubungan sebab akibat, penelitian jenis ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap data dari faktor yang diduga sebagai pembanding (Dharma, 2008). Dalam penelitian ini melakukan pengamatan dari variabel instrument makroprudential dan variabel mikroprudential, yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Jenis metode penelitian ini adalah studi korelasional, studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih dengan berhubungan dengan variabel lain. Derajat hubungan variabel dinyatakan dalam satu indeks yang dinamakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi sendiri digunakan untuk menguji hipotesis yang terjadi antar variabel yang menyatakan besar kecilnya hubungan antara kedua variabel. Studi korelasi untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel tersebut. Peneliti ingin mengetahui semua variabel yang ada yaitu variabel makroprudential dan variabel mikroprudential, yang paling kuat hubungannya dengan stabilitas sistem keuangan.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Gujarati, 2004). Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek

penelitian secara langsung sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu seperti observasi yang bersifat langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya sering berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data perbankan pada periode 2015 – 2019. Sumber data penelitian diperoleh data pusat data laporan keuangan indonesia yang telah dipublikasikan melalui website resmi lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (bi.go.id). otoritas jasa keuangan (ojk.go.id) dan BPS (bps.go.id). Sampel (bahasa inggris: sample) merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti; dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Kriteria yang digunakan untuk memperoleh penelitian antara lain :

- a) Bank Konvensional yang tergolong memiliki aset terbesar di Indonesia dan masih beroperasi dari tahun 2012-2019.
- b) Bank ini mempublikasikan laporan tahunan maupun laporan bulanan yang sudah di konsolidasi untuk periode 2012-2019 di dalam website resmi Bank Indonesia

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia bank memiliki aset terbesar sejumlah 20 bank baik, BUMN, Bank milik pemerintah, bank daerah dan Bank yang tergolong Bank Buku 4 dengan modal paling sedikit sebesar Rp. 30 triliun. Adapun bank yang akan diteliti BRI, BNI, MANDIRI, BCA, CIMB NIAGA, PANIN yang kemudian dikelompokkan menjadi satu, yaitu bank BUKU 4. Sedangkan data yang diperoleh dididapkan dari Statistik Perbankan Indonesia dan laporan keuangan bank yang akan diteliti.

Tabel 3.1 : Sumber Data Penelitian

Variabel	Satuan	Periode Waktu	Sumber Data
LTV	Rupiah	2012-2019	Bank Indonesia
GWM LFR	Rupiah	2012-2019	Bank Indonesia

Net Open Position	Rupiah	2012-2019	Bank Indonesia
CAR	Persentase	2012-2019	OJK
NPL	Persentase	2012-2019	OJK
BOPO	Persentase	2012-2019	OJK
ROA	Persentase	2012-2019	OJK
LDR	Persentase	2012-2019	OJK

Sumber : Diolah Penulis, 2019

3.3 Definisi Variabel Operational

Definisi variabel penelitian digunakan memberikan batasan yang tegas terhadap variabel yang diteliti.

Tabel 3.2 : Variabel Kebijakan Makroprudential Dan Kebijakan Mikroprudential

Variabel	Definisi	Formula
Stabilitas sistem keuangan (Y)	Kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien	Pengukuran yang digunakan untuk mengamati stabilitas sistem keuangan
CAR (X1)	Besarnya jumlah modal yang dimiliki oleh bank terhadap bobot risiko atas aktiva yang dimiliki oleh bank	$CAR = \frac{\text{modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100$
NPL (X2)	Besarnya jumlah kredit macet terhadap total kredit	$NPL = \frac{\text{kredit macet}}{\text{total kredit}} \times 100$

LDR (X3)	Perbandingan anatara kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga	$LDR = \frac{\text{kredit}}{\text{DP 3}} \times 100$
LTV (X4)	Besarnya property kredit yang diberikan bank berdasarkan tipe property	70 % - 90 % KPR dari nilai anggunan perumahan tipe 22-70
BOPO (X5)	Perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional	$BOPO = \frac{\text{beban operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100$
ROA (X6)	Perbandingan laba bersih sebelum pajak denga total aktiva	$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100$
GWM LFR (X7)	Perhitungan parameter disentif bawah da atas degan selisih KPP, dan KPPM insentif	Parameter disentif (batas bawah / atas LFR target – LFR bank) x DPK dalam rupiah
NOP (X8)	Pengoptimalan tingat keuntungan bagi devisa dalam transaksi vauta asing	Tingkat NOP x modal bank

Sumber : Dioalah Penulis, 2019

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang menjelaskan masalah penelitian tentang hubungan antara kebijakan mikroprudensial dengan kebijakan mikroprudensial terhadap stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. dalam menguji hubungan antar dua variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga penelitian ini di uji menggunakan metode regresi linear berganda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan makroprudensial yang terdiri dari beberapa instrumen seperti CAR, NPL, LTV, dan LDR dengan kebijakan mikroprudensial yang terdiri dari beberapa instrumen seperti BOPO, ROA, GWM LFR, dan NOP. Sehingga dalam penelitian ini digunakan metode regresi liner berganda. Karena, regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui

pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas.

Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen.

Dalam menentukan atau melihat bahwa metode regresi linier ini terdapat masalah antar variabel atau tidak maka pada metode ini diperlukan uji asumsi klasik. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan uji asumsi klasik, dan khusus untuk model regresi linier berganda maka uji asumsi klasik juga harus menggunakan model multikolineritas. Adapun model yang digunakan dalam metode asumsi klasik adalah autokorelasi, normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan multikolineritas. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam menguji metode regresi linier berganda yang digunakan adalah E-VIEWS.

Sifat hubungan antara dua kelompok variabel.

- Jumlah hubungan yang secara statistik signifikan antara dua kelompok variabel.
- Sejauh mana varians kelompok variabel yang satunya (variabel dependen) bergantung pada kelompok variabel lainnya (variabel independen).
- Bobot yang menentukan peran sebuah variabel sedemikian rupa sehingga korelasi antara dua kelompok variabel memiliki korelasi yang tinggi.

3.4.1 Analisis Model faktor

Analisis faktor merupakan salah satu teknik analisis statistika yang banyak digunakan dalam penelitian bidang sosial, ekonomi dan manajemen. Perkembangan aplikasinya saat ini sudah sampai pada bidang penelitian eksakta. Analisis faktor merupakan salah satu dari teknik ketergantungan (interdependensi) antar variabel. Prinsip dasar analisis faktor adalah mengekstraksi sejumlah faktor bersama (*common factors*) dari gugusan variabel asal $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$. Dari variabel X merupakan variabel yang dapat diukur atau dapat diamati secara langsung sehingga sering disebut sebagai observable variabel atau variabel satu indikator.

Salah satu fungsi dari analisis faktor adalah mereduksi jumlah variabel dengan cara mengelompokkannya. Didalam analisis faktor variabel variabel dikelompokkan berdasarkan korelasinya. Agar membentuk suatu faktor yang baru. Kegunaan analisis faktor adalah :

- Mereduksi variabel menjadi variabel yang baru yang jumlahnya lebih sedikit
- Mempermudah interpretasi hasil analisis sehingga mempermudah menemukan informasi yang realistik

3. Pengelompokkan atau pemetaan variabel berdasarkan karakteristik yang terkandung didalam faktor
4. Dengan diperoleh skor faktor maka analisis faktor merupakan langkah awal dari berbagai metode analisis data yang lain misal, regresi, ANOVA, dsb.

3.4.1.1 Analisis Konfirmatori

Pengujian yang digunakan untuk menguji apakah instrument kebijakan makroprudential dan mikroprudential memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Terlebih dahulu menggunakan analisis faktor, sedangkan analisis faktor yang digunakan dari beberapa jenis analisis faktor adalah model faktor konfirmatori untuk mengelompokkan variabel yaitu variabel dari instrument kebijakan makroprudential dan mikroprudential. Sehingga mempersiapkan untuk menginput data pada metode selanjutnya.

Menurut Johnson dan Wichern (1982), analisis faktor merupakan teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk meringkas sejumlah p variabel yang diamati menjadi sejumlah m faktor penting, dengan $m < p$. Misal X adalah vektor random teramati yang memiliki p komponen pada pengamatan ke- i , dengan vektor rata-rata dan matriks kovarians Σ . vektor X bergantung secara linier dengan variabel yang disebut faktor bersama dan sejumlah sumber variansi dari yang disebut faktor spesifik. Model analisis faktor menurut Johnson dan Wichern adalah

$$X_1 - \mu_1 = l_{11}F_1 + l_{12}F_2 + \dots + l_{1m}F_m + \varepsilon_1$$

$$X_2 - \mu_2 = l_{21}F_1 + l_{22}F_2 + \dots + l_{2m}F_m + \varepsilon_2$$

$$X_p - \mu_p = l_{p1}F_1 + l_{p2}F_2 + \dots + l_{pm}F_m + \varepsilon$$

Keterangan:

X_p = Variabel ke- p

μ_p = Rata-rata variabel ke- p

l_{pm} = Bobot variabel (factor loading) ke- p pada faktor ke- m .

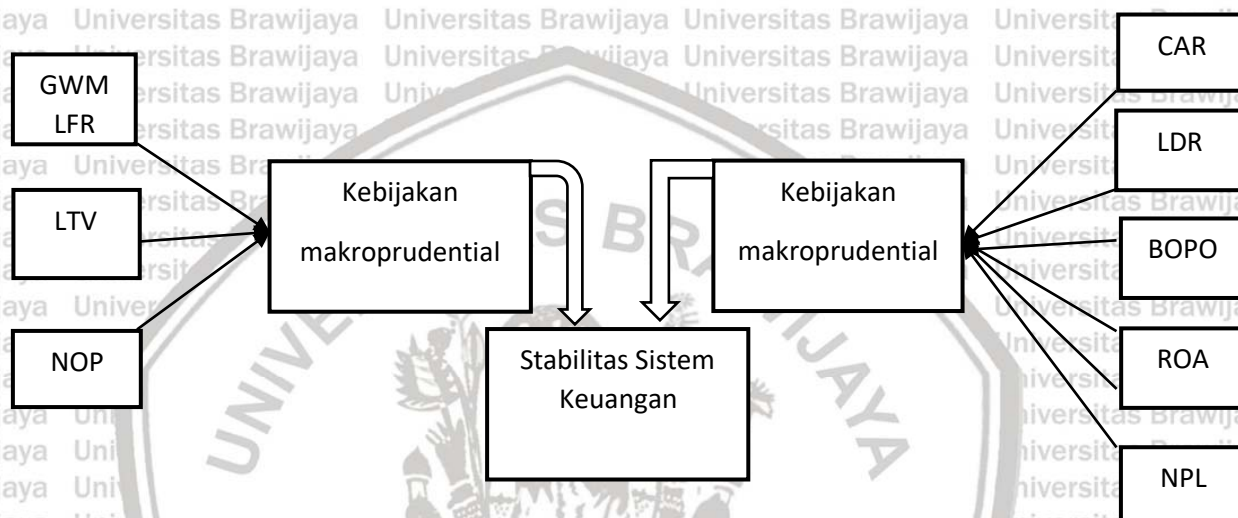
F_m = Faktor bersama (common factor) ke- m

ε_p = standart error

Analisis faktor konfirmatori adalah suatu teknik analisis faktor yang secara apriori telah diketahui atau ditentukan terlebih dahulu variabel-variabel mana saja yang berhubungan dengan faktor-faktor mana saja (Gudono, 2011). Menurut Purwanto (2012),

Analisis faktor konfirmatori menghipotesiskan telah ditemukannya sejumlah faktor dari variabel dan analisis dilakukan untuk menegaskan kemandirian faktor dan menguji kontribusi butir kepada faktor-faktornya. Sedangkan menurut Hair, Anderson, Tatham, Black (1995) analisis faktor konfirmatori adalah analisis faktor yang bertujuan untuk meringkas atau mereduksi variabel amatan secara keseluruhan menjadi beberapa variabel atau faktor baru, akan tetapi variabel atau faktor baru yang terbentuk tetap mampu merepresentasikan variabel utama yang digunakan apabila faktor yang terbentuk telah ditetapkan terlebih dahulu.

Gambar 3.1 : Model Faktor Konfirmatori



Sumber : Diolah penulis, 2019

Gambar di atas menunjukkan sebuah model pengukuran dimana terdapat 2 konstruk dengan 4 variabel makroprudential dan 4 variabel mikroprudential. Sehingga dengan dikelompokkannya variabel berdasarkan karakteristik yang terkandung dalam faktor (common faktor) yang saling berkorelasi, hubungan antara variabel dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$SSK = f(F1, F2)$$

Keterangan:

F1 = Variabel Makroprudential

F2 = Variabel Mikroprudential

Tujuan utama dalam analisis faktor konfirmatori adalah menentukan nilai koefisien atau factor loading yang dapat menghasilkan skor faktor sebagai data input, untuk melakukan metode analisis data yang lain. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen ini perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Persamaan berikut akan mendapat skor faktor dari variabel makroprudential dan mikroprudential :

$$F1 = \ell_{GWM} LFR + \ell_{LTV} + \ell_{NOP}$$

$$F2 = \ell_{CAR} + \ell_{BOPO} + \ell_{ROA} + \ell_{LDR} + \ell_{NPL}$$

Dimana :

F1 = Nilai Faktor Makroprudential

F2 = Nilai Faktor Mikroprudential

ℓ = Lemma (Faktor loading)

Hasil yang didapat dari model faktor konfirmatori dengan cara pengelompokan dan pemetaan variabel berdasarkan karakteristik (*mapping and clustering*) yang terkandung didalam variabel makroprudential dan variabel mikroprudential didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$SSK = \beta_0 + \beta_1 F1 + \beta_2 F2$$

Dimana :

β = Nilai Koefisien Faktor Loading

F1 = Skor Faktor Variabel Makroprudential

F2 = Skor Faktor Variabel Mikroprudential

3.4.2 Model Regresi Linear Berganda

Analisis konfirmatori telah melakukan pengelompokan variabel berdasarkan karakteristik sesuai jenisnya yaitu variabel makroprudential dan mikroprudential dan

memukan hasil validitas makro dan mikro terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang kijakan makroprudential dan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini digambarkan dengan rumus :

$$SSK = \alpha + \beta_1 \text{ makroprudential} + \beta_2 \text{ mikroprudential}$$

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda, untuk mengetahui adanya pengaruh dua variabel dependen yang mempengaruhi variabel independennya. Dimana dalam pengujian ini menggunakan pengujian asumsi klasik dengan model regresi berganda. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. adapun beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan adalah, linertitas, autokorelasi, multikolinearitas, heterokedatisitas, dan normalitas.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Pada uji regresi liner berganda, uji asumsi klasik merupakan salah satu prasyarat seperti yang sudah dijelaskan. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain. Adapun penjelasan dari tahapan uji asumsi klasik yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadinya kesalahan dalam tahap pengujian ini yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada metode yang paling baik atau paling tepat. Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis

(misalnya signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu: melakukan transformasi data, melakukan trimming data outliers atau menambah data observasi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu).

Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan Run Test dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (generalized difference equation).

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN****4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Sistem keuangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai lembaga keuangan. Untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang baik antara bank sentral dengan otoritas jasa keuangan, yang memiliki kebijakan masing masing yaitu kebijakan makroprudential dan mikroprudential. Perbedaan kewenangan antara kedua kebijakan tersebut, memerlukan adanya pembagian kewenangan dan tugas yang jelas, agar tidak terjadi gesekan kepentingan antara bank sentral dan otoritas jasa keuangan demi terwujudnya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Pada kebijakan makroprudential dan kebijakan mikroprudential terdapat variabel variabel yang mempengaruhi tingkat stabilitas sistem keuangan, pada penelitian ini dapat diketahui variabel manakah yang merupakan variabel terkuat dan variabel terlemah dalam mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

4.1.1 Gambaran Umum Stabilitas Sistem Keuangan

Sistem keuangan pada paruh kedua 2019 relatif stabil bahkan membaik sejalan dengan menurunnya risiko perekonomian domestik. Meningkatnya stabilitas sistem keuangan didukung oleh tingginya permodalan dan likuiditas perbankan serta terjaganya stabilitas penurunan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) dan Indeks Risiko Sistemik Perbankan (IRS P) pada semester II 2019 dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dan masih tingginya risiko kredit perlu tetap diwaspadai.

Membaiknya stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari pengaruh menurunnya risiko sistem keuangan global dan regional. Penurunan risiko global dan regional tercermin dari perbaikan perekonomian yang disertai dengan menurunnya ketidakpastian dipasar keuangan. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global dimotori oleh pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS disumbang oleh konsumsi dan investasi sebagaimana tercermin dari penjualan eceran yang meningkat. Ekonomi Tiongkok tumbuh meningkat diatas perkiraan ditopang konsumsi dan investasi swasta.

Stabilnya sistem keuangan juga dapat mempengaruhi perputaran jumlah uang yang beredar (JUB) di masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem keuangan yang berjalan dengan baik mengakibatkan inflasi yang dapat dikembalikan. Selain itu, biaya dari instabilitas sistem keuanganpun dapat ditekan . ketika sistem ekauangan tidak stabil maka pengaruh dari

instabilitas tersebut menyerang langsung sektor keuangan yang mempunyai biaya restrukturisasi yang tidak murah, seperti sektor perbankan.

4.1.2 Gambaran Umum Bank Buku 4

Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan yang mengelompokkan Bank ke dalam empat kategori khusus. Aturan ini kemudian diperbaharui oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank. Secara garis besar, aturan dimaksud untuk mengatur mengenai pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha sesuai dengan besarnya modal inti. Pengelompokan ini dikenal dengan istilah Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). BUKU 4 adalah bank dengan modal Inti paling sedikit sebesar Rp 30 triliun. Sebagai pengguna jasa perbankan, setiap orang pasti ingin memiliki mitra yang dapat diandalkan dari sisi keamanan bertransaksi mau pun menyimpan dana. Diantara pilihan tersebut, bank yang berkategori BUKU 4 merupakan pilihan yang paling cocok. Dengan permodalan yang lebih kuat, bank BUKU 4 dinilai lebih sehat dan memiliki risiko bisnis yang lebih rendah.

Konvensional : Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (*international world wide*).

Syariah : dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan dalam dan luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (*international world wide*).

Adapun Bank-Bank yang masuk dalam Kategori BUKU 4 di Indonesia yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, CIMB NIAGA dan Bank PANIN.

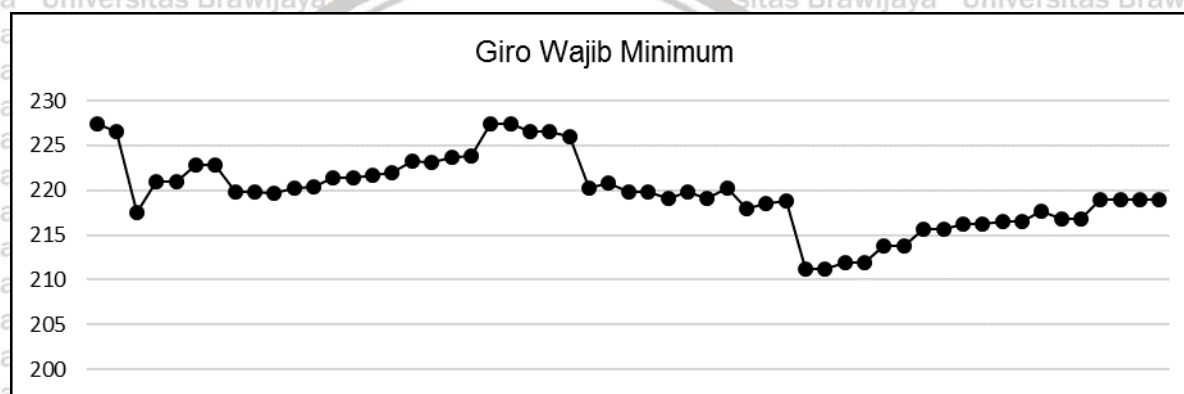
4.1.3 Perkembangan GWM LFR Pada Bank Buku 4

Bank Indonesia menyesuaikan ketentuan mengenai GWM (Giro Wajib Minimum) Sekunder dan GWM LDR (Loan to Deposit Ratio). Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti tekanan inflasi yang cenderung meningkat, current account defisit, dan faktor eksternal lainnya. Kewajiban pemenuhan GWM Sekunder yang saat ini sebesar 2,5% dari DPK (Dana Pihak Ketiga) akan disesuaikan secara bertahap menjadi 4%. Sementara

itu, GWM LDR juga akan disesuaikan dengan menurunkan batas atas GWM LDR dari 100% menjadi 92%, yang akan berlaku efektif sejak tanggal 2 Desember 2013.

Secara garis besar, ketentuan mengenai GWM di perbankan dibagi menjadi GWM Rupiah dan GWM Valas. GWM Rupiah terdiri atas GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM LDR, sementara GWM Valas hanya terdiri dari GWM Primer. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia), SDBI (Sertifikat Deposito Bank Indonesia), SBN (Surat Berharga Negara) dan/atau Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK.

Grafik 4.1 Perkembangan GWM LFR Bank Buku 4



Sumber : Diolah Penulis, 2020

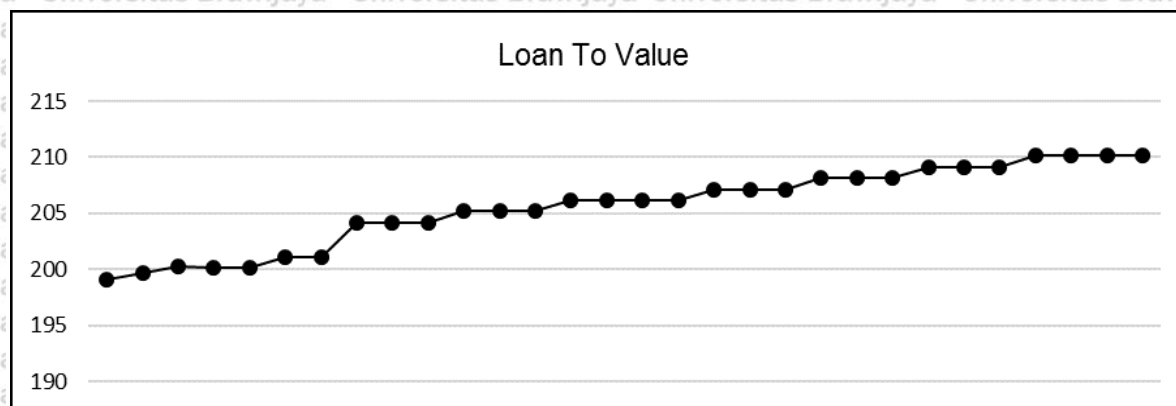
Pada grafik diatas ditunjukkan bahwa nilai GWM LFR pada tahun 2015 – 2019 mempunyai nilai yang cukup stabil, meskipun terdapat nilai yang kurang stabil pada tahun 2018 ke 2019. Dengan adanya penyesuaian ketentuan, Kewajiban GWM Sekunder yang saat ini sebesar 2,5%. Sehingga pada tahun 2018 menuju 2019 terdapat sedikit penurunan namun bergerak stabil menuju 2019.

4.1.4 Perkembangan LTV Pada Bank Buku 4

Bank Indonesia kembali menyempurnakan ketentuan mengenai Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti serta Rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Penyempurnaan ketentuan dilakukan melalui penerbitan ketentuan baru, yaitu PBI No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk

Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV), berlaku sejak 29 Agustus 2016.

Grafik 4.2 Perkembangan LTV Bank Buku 4

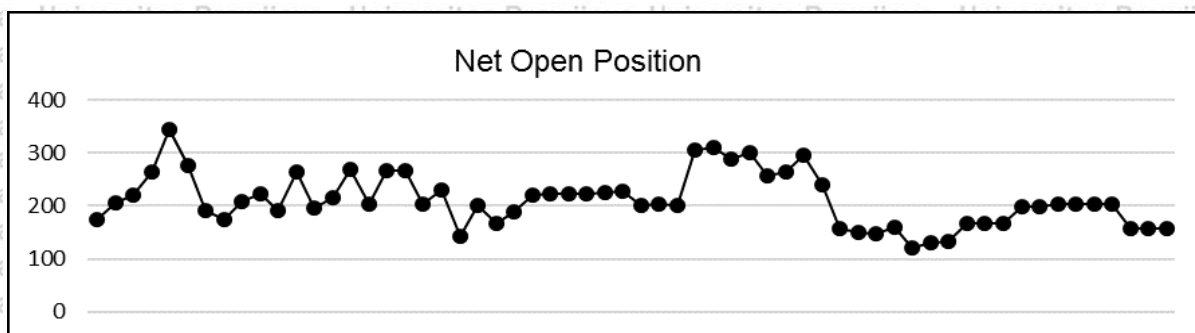


Sumber : Diolah Penulis, 2020

4.1.5 Perkembangan NOP Pada Bank Buku 4

Sejak Juli 1997 telah terjadi krisis ekonomi dan moneter yang mengguncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional. Memasuki tahun 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai tukar rupiah terhadap dollar tertekan hingga ke level Rp. 16.000,- per US Dollar. Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum ini kemudian dicabut dan untuk selanjutnya ketentuan posisi devisa neto diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Bank Umum. Melalui Peraturan Bank Indonesia no. 7/37/PBI/2005 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia no. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Bank Umum tersebut Bank Indonesia mengatur posisi devisa neto bank umum yaitu Bank wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto dalam setiap tenggang 30 menit secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal.

Grafik 4.3 Perkembangan LTV Bank Buku 4



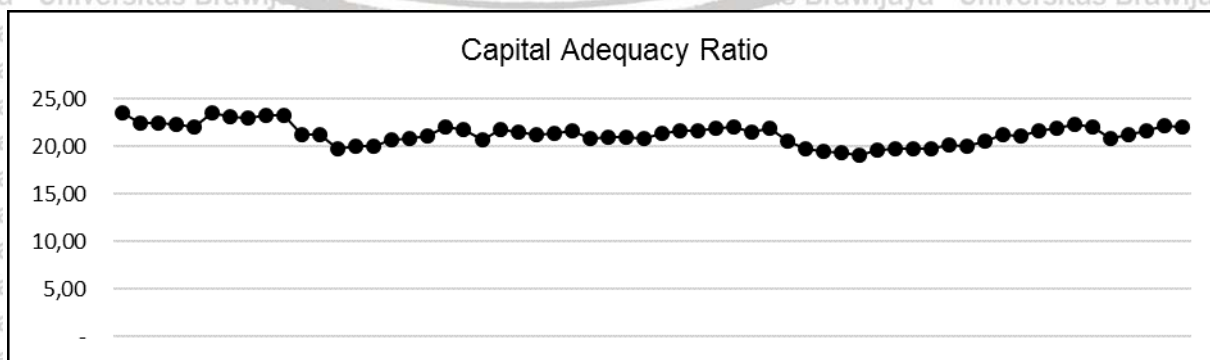
Sumber : Data Diolah, 2020

Nilai Net Open Position memang gerakannya tidak stabil hal ini dikarenakan nilai valas memang bergerak tidak stabil dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia. Bila dilihat pada saat ini terjadi perang dagang antara china dan AS yang mempengaruhi perekonomian dunia sehingga mengakibatkan nilai valuta asing menjadi tidak stabil begitu juga dengan gejolak perekonomian yang lainnya.

4.1.6 Perkembangan CAR Pada Bank Buku 4

Bank Indonesia menyatakan, stabilitas sistem keuangan terjaga, disertai dengan risiko kredit yang terkendali dan fungsi intermediasi yang tetap berlanjut berkat rasio kecukupan modal tinggi. Perkembangan ini tecermin dari rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan Juli 2019 yang tetap tinggi yakni 23,1%. Sementara itu, pertumbuhan kredit sedikit melambat dari 9,9% (yoy) pada Juni 2019 menjadi 9,6% (yoy) pada Juli 2019, terutama dipengaruhi oleh terbatasnya permintaan kredit korporasi. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juli 2019 sebesar 8,0% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2019 sebesar 7,4% (yoy).

Grafik 4.4 Perkembangan CAR Bank Buku 4

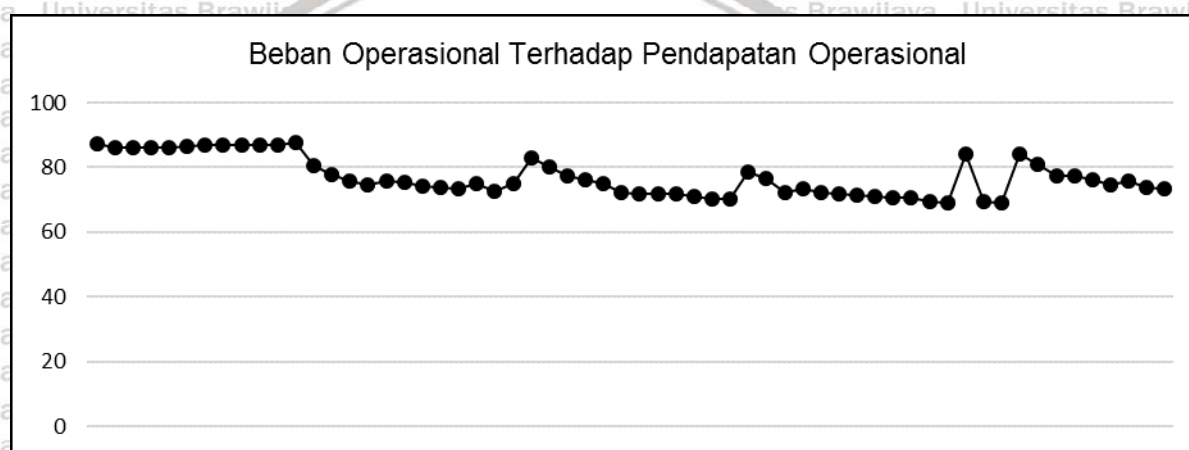


Sumber : Data Diolah, 2020

4.1.7 Perkembangan BOPO Pada Bank Buku 4

Efisiensi perbankan dicerminkan dalam perkembangan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami peningkatan. Dalam efisiensi perbankan, rasio BOPO mengalami kenaikan menjadi 81,46 persen pada Agustus 2019 dibandingkan dengan Juni 2019 sebesar 80,42 persen. Nilai BOPO idealnya 60 persen namun nilai BOPO di Indonesia rata-rata masih dalam 80 persen. Peningkatan BOPO dikarenakan biaya operasional yang terus membesar. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi perbankan masih rendah sehingga banyak biaya operasional yang harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi kinerja perbankan.

Grafik 4.5 Perkembangan BOPO Bank Buku 4

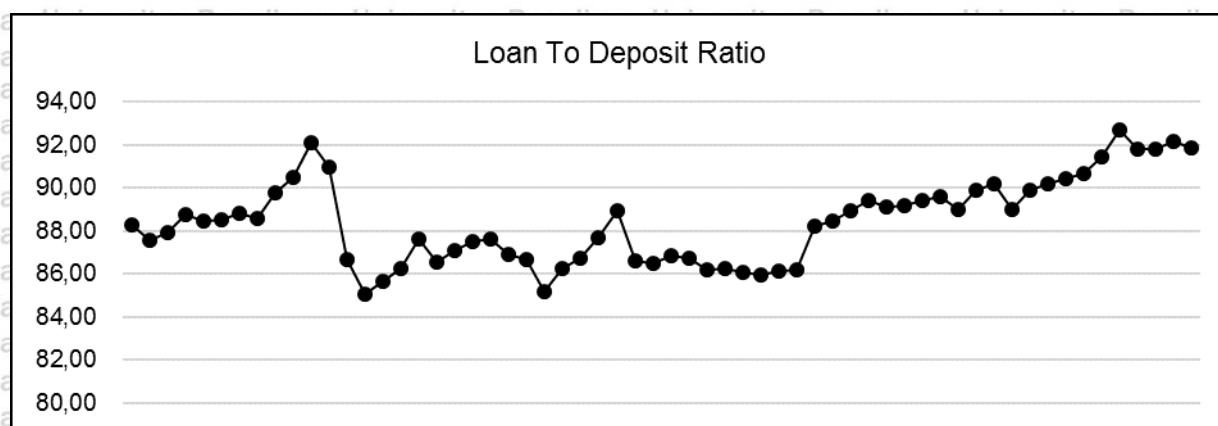


Sumber : Data Diolah, 2020

4.1.8 Perkembangan LDR Pada Bank Buku 4

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2018, loan to deposit ratio (LDR) bank umum mencapai 94,09%. LDR Bank BUKU IV mencapai 89,43%. Peningkatan LDR didorong oleh tingginya pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang mencapai 16% menjadi Rp 119,52 triliun pada akhir Juni 2018. Hal ini dikarenakan Pertumbuhan kredit yang tinggi sementara dana pihak ketiga (DPK) seret karena banyak diserap bank besar.

Grafik 4.6 Perkembangan LDR Bank Buku 4

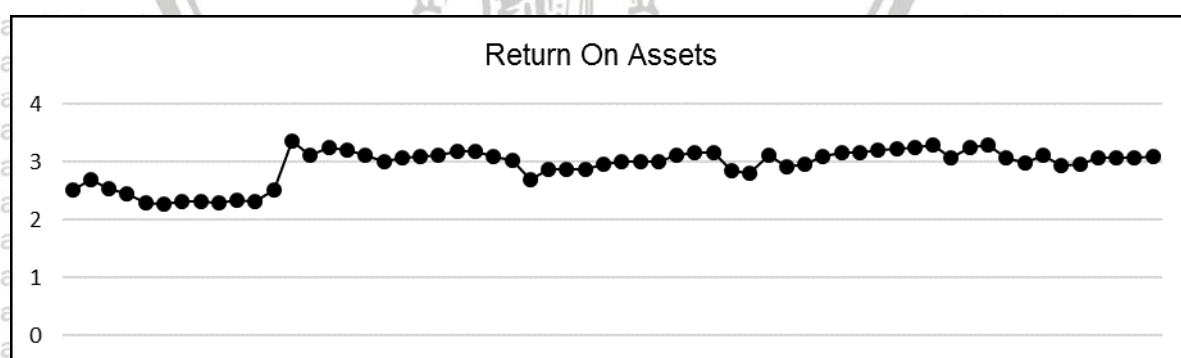


Sumber : Data Diolah, 2020

4.1.9 Perkembangan ROA Pada Bank Buku 4

Pada tahun 2015 ROA mengalami perkembangan yaitu sebesar 0.49%, ROA (Return On Asset) meningkat lagi sebesar 0.63% , begitu dengan tahun 2017 perkembangan ROA stabil dengan tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 perkembangan ROA di tahun 2018 melonjak sangat pesat dari 0.63% menjadi 1.26%. Hal ini jelas bahwa perbankan tidak mengalami depresi saat mengalami penurunan perkembangan ROA melainkan dengan kenaikan perkembangan ROA dapat menjelaskan bahwa perbankan dalam kondisi baik.

Grafik 4.7 Perkembangan ROA Bank Buku 4



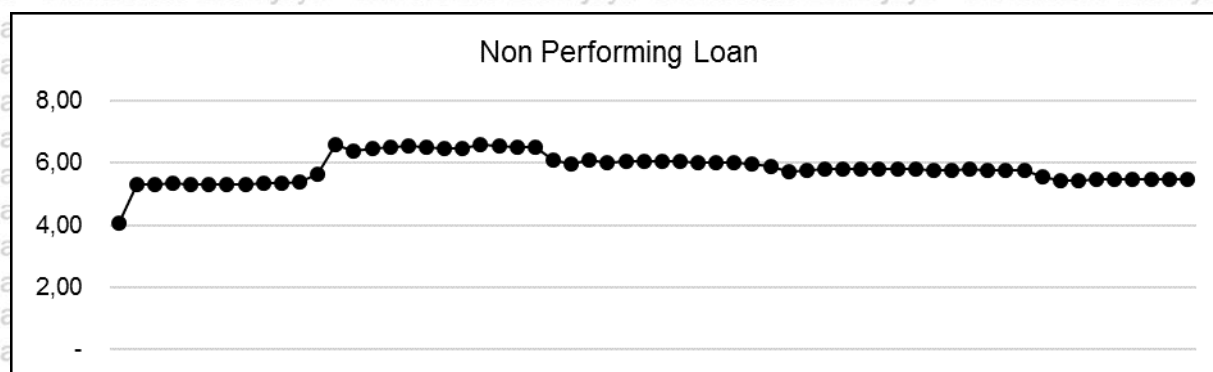
Sumber : Data Diolah, 2020

4.1.10 Perkembangan NPL Pada Bank Buku 4

Perkembangan risiko kredit terlihat dari *Rasio Non Performing Loan (NPL)* mengalami peningkatan. Pada Agustus 2019 , rasio NPL mencapai 2,76 persen naik

dibandingkan dengan akhir Juni 2015 sebesar 2,56 persen. Penyebab kenaikan tersebut karena harga sektor komoditas seperti sawit, batu bara dimana sektor ini mempunyai andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Penurunan harga komoditas membuat perusahaan komoditas berkurang kemampuannya untuk membayar kredit perbankan. Sehingga bank yang memberikan kredit pada sektor ini nilai NPL naik. Selain itu pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar yang masih melemah.

Grafik 4.8 Perkembangan NPL Bank Buku 4



Sumber : Data Diolah, 2020

4.2 Hasil Analisis Statistik

Berdasarkan teknik analisis yang disebutkan pada Bab III, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga analisis statistik. Pertama, analisis faktor untuk menentukan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Kedua, teknik analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh faktor tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan. Ketiga, analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil dari analisis regresi linear berganda terhadap variabel makroprudential dan mikroprudential.

4.3 Hasil Analisis Faktor

Dalam pengujian analisis faktor ini bertujuan untuk mengelompokkan variabel dan menyaring variabel yang paling unggul. Langkah pertama yang digunakan dalam analisis faktor adalah mengetahui variabel yang layak dimasukkan dalam pengujian analisis faktor. Untuk mengetahui variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor diketahui dengan syarat yaitu. Uji KMO dan *Bartlett's test*. Hipotesis dalam uji KMO dan *Bartlett's test* yaitu jika nilai signifikansi < 0.05 artinya sampel sudah memadai untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Sebaliknya jika signifikansi > 0.05 maka sampel belum dapat dianalisis lebih lanjut.

4.3.1 Hasil Uji KMO dan Bartlett's test

Berikut merupakan hasil uji *KMO dan Bartlett's test* untuk variabel makroprudential dan mikroprudential dari bank yang tergolong bank buku 4 sesuai dengan penelitian saya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 KMO Dan Bartlett's Test Bank Buku 4

KMO Dan Bartlett's Test		Makroprudential	Mikroprudential
Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy.		,618	0,695
Bartlett's Test Of Sphericity	Sig.	0,000	0,000

Sumber : Data diolah, 2020

Dari hasil KMO dan *Bartlett's test* pada bank buku 4 pada variabel makroprudential sebesar 0,618 dan variabel mikroprudential sebesar 0,695 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka, dapat diketahui bahwa variabel variabel yang termasuk kedalam penelitian ini telah memenuhi atau memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Variabel dari makroprudential dan mikroprudential telah memadai untuk dilakukan analisis faktor.

4.3.2 Hasil Uji Component Matrix

Pengujian selanjutnya adalah component matrix dimana, komponen yang terbentuk akan membentuk distribusi nilai dari masing masing variabel yang akan ditunjukkan dari komponen yang akan menunjukkan korelasi dari masing masing variabel dengan komponen yang akan dibentuk. Yaitu antar variabel makroprudential dan variabel mikroprudential. Nilai suatu korelasi dikatakan kuat jika $>0,05$ sedangkan sebaliknya jika nilai korelasi $< 0,05$ maka korelasi antar variabel lemah. Hal ini sering diketahui untuk menentukan penggolongan atau peringkat dari masing masing variabel.

Tabel 4.2 Component Matrix Variabel Makroprudential Bank Buku 4

Component	
Variabel	Component
GWM LFR	0,973
LTV	-0,916
NOP	0,749

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel komponen matrix pada tabel 4.7 pada variabel makroprudential diatas menunjukkan bahwa variabel GWMLFR memiliki korelasi yang paling kuat yang dapat dilihat bahwa nilai GWMLFR yang paling maksimal sebesar 0.973. Diikuti oleh variabel NOP, yang mempunyai nilai sebsar 0,749. Kemudian, variabel LTV yang memiliki nilai korelasi -0,916. Diketahui Bahwa variabel GWM LFR dan NOP merupakan variabel yang memiliki nilai korelasi yang kuat dibandingkan dengan nilai korelai pada variabel LTV.

Tabel 4.3 Component Matrix Variabel Mikroprudential Bank Buku 4

Component	
Variabel	Component
CAR	-0,829
BOPO	0,884
LDR	0,958
ROA	0,193
NPL	-0,528

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel komponen matrix pada tabel 4.8 pada variabel mikroprudential diatas menunjukkan bahwa variabel LDR memiliki korelasi yang paling kuat yang dapat dilihat bahwa nilai LDR yang paling maksimal sebesar 0.958172226. Kedua, variabel BOPO, yang mempunyai nilai sebesar 0,884. Nilai korelasi yang ketiga adalah CAR yang mempunyai nilai sebesar 0,829. Kemudian, variabel ROA yang memiliki nilai korelasi -0,193. Terahir

adalah variabel NPL yang memiliki nilai korelasi sebesar -0,528. Nilai pada variabel mikroprudential diatas menunjukkan bahwa variabel LDR, BOPO dan ROA tergolong memiliki korelasi yang kuat dibandingkan dengan variabel ROA dan NPL.

4.3.3 Analisis Faktor Konfirmatori

Tujuan utama dalam analisis faktor konfirmatori adalah menentukan nilai koefisien atau factor loading yang dapat menghasilkan skor faktor sebagai data input, untuk melakukan metode analisis data yang lain. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen ini perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Persamaan berikut akan mendapat skor faktor dari variabel makroprudential dan mikroprudential :

$$F1 = \ell 0.840 + \ell 0.947 + \ell 0.560$$

$$F2 = \ell 0.109 + \ell 0.819 + \ell 0.534 + \ell 0.741 + \ell 0.924$$

Dimana :

F1 = Faktor Variabel Makroprudential

F2 = Faktor Variabel Mikroprudential

ℓ (lemma) = faktor loading

4.4 Hasil Model Regresi Linear Berganda

Pada analisis faktor konfirmatori telah dilakukan pengelompokkan variabel berdasarkan karakteristik sesuai jenisnya yaitu variabel makroprudential dan mikroprudential. Dalam penelitian ini digunakan pengujian uji linear berganda, untuk mengetahui adanya pengaruh dua variabel dependen untuk mempengaruhi variabel independennya.

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Makroprudential Dan Mikroprudential

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,250	0,043		28,939	0,000
	F1	-0,143	0,055	-0,540	-2,602	0,014
	F2	0,121	0,055	0,456	2,198	0,036

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari hasil uji regresi diatas, dengan variabel dependen stabilitas sistem keuangan maka dituliskan dengan rumus sebagai berikut :

Dimana :

$$SSK = \alpha + \beta_1 \text{ Makroprudential} + \beta_2 \text{ Mikroprudential}$$

$$SSK = 1.250 - 0.143 Ma + 0.121 Mi$$

Dari model tersebut bahwa variabel makroprudential mempengaruhi negatif stabilitas sistem keuangan sedangkan variabel mikroprudential mempengaruhi secara negatif stabilitas sistem keuangan. berdasarkan nilai koefisien uji regresi diatas dapat diartikan, bahwa rata – rata nilai ISSK adalah sebesar 1.250 dengan asumsi bahwa variabel makroprudential dan mikroprudential nilainya adalah 0.

Variabel makroprudential memiliki hubungan negatif terhadap stabilitas ssitem keuangan, dengan kata lain jika terjadi peningkatan pada faktor efisiensi maka indeks stabilitas sistem keuangan akan mengalami penurunan. Peningkatan 1 satuan pada variabel makroprudential akan berpengaruh terhdap penurunan ISSK sebesar 0.143, dengan asumsi bahwa variabel mikroprudential nilainya tetap. Sedangkan, varibel mikroprudential memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan, dengan demikian jika terdapat peningkatan pada pada variabel mikropudential maka juga akan mempengaruhi nilai stabilitas sistem keuangan untuk mengalami peningkatan. Untuk variabel mikroprudential ini bila

terjadi peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan berpengaruh pada peningkatan indeks stabilitas sistem keuangan sebesar 0.121 dengan asumsi bahwa variabel makroprudential nilainya tetap.

4.5 Hasil Uji Hipotesis Regresi

Hasil uji hipotesis menjelaskan mengenai pengaruh variabel kebijakan makroprudential dan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan sesuai dengan dugaan awal bahwa dari variabel variabel dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

4.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji kelayakan model atau y disebut sebagai uji F (sebagai uji simultan model) merupakan tahapan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 4.5 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,442	2	0,221	3,698	.037 ^b
	Residual	1,732	29	0,060		
	Total	2,174	31			

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel makroprudential dan mikroprudential (F_1 dan F_2) secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0.037 < 0.05$ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau pengaruh secara bersama bersama variabel makroprudential dan mikroprudential (F_1 dan F_2) terhadap stabilitas sistem keuangan.

4.5.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan atau model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Dimana,

parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,250	0,043		28,939	0,000
	F1	-0,143	0,055	-0,540	-2,602	0,014
	F2	0,121	0,055	0,456	2,198	0,036

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel makroprudential (F1) sebesar 0.014, yang artinya $0.014 < 0.05$. Maka dari data tersebut, diketahui bahwa terdapat pengaruh variabel makroprudential (F1) terhadap stabilitas sistem keuangan. Kemudian, nilai variabel mikroprudential (F2) sebesar 0.036. Diartikan $0.036 < 0.05$ sehingga diketahui dari data tersebut terdapat pengaruh variabel mikroprudential (F2) terhadap stabilitas sistem keuangan.

4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai RSquare atau Adjusted R-Square. R-Square digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi penulis lebih senang menggunakan R-Square daripada Adjusted R-Square, walaupun variabel bebas lebih dari satu.

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.451 ^a	0,203	0,148	0,24440

Sumber : Data Diolah, 2020

Hasil dari nilai R-Square variabel makroprudential dan mikroprudential (F1 dan F2) yang besarnya 0.148 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh kedua variabel tersebut terhadap variabel SSK sebesar 14,8 %. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi linier.

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan dari variabel variabel pada kebijakan makroprudential dan mikroprudential terhadap perkembangan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah bank terbesar yang terdaftar di BI atau yang tergolong bank BUKU 4. Penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda dengan menggunakan software e – views 9

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tergolong sebagai data sekunder, sehingga metode pengumpulan data menggunakan cara nonparticipant observation. Beberapa teknis analisis yang digunakan adalah uji analisis faktor, analisis regresi linear yang terdiri dari uji f (uji simultan) dan uji t (uji parsial), dan uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi).

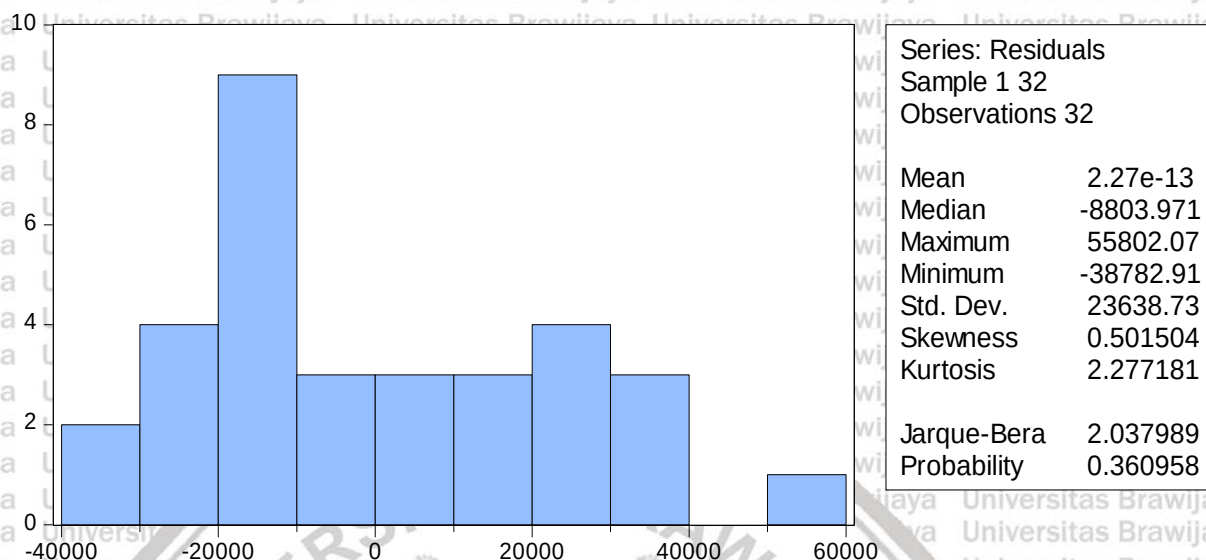
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Dalam penelitian uji asumsi klasik didapatkan dari variabel pada kebijakan makroprudential dan mikroprudential yang telah dilakukan uji regresi linear berganda.

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas digunakan pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara

normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal (Santosa&Ashari, 2005:231).

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Diolah Penulis, 2020

Pada uji normalitas ini, menggunakan teknik histogram normaliti test yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas harus lebih besar dari nilai α sebesar 5 % atau $\alpha = 0.05$. Pada variabel makroprudential diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.360958 yang berarti $0.360958 > 0.05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai dari variabel makroprudential berdistribusi normal dan terbebas dari normalitas secara statistik.

4.6.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali 2007:91). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 , terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10 , tidak terjadi multikolinearitas (Wijaya, 2009:119).

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	18666459	1.000000	NA
MAKROPRUDENTIAL	0.003022	1.568508	1.568508
MIKROPRUDENTIAL	0.003022	1.568508	1.568508

Sumber : Diolah Penulis, 2020

Dari hasil output data diatas didapatkan bahwa nilai semua nilai $VIF < 10$ ini berarti data tersebut tidak terjadi multikolonieritas. Dan menyimpulkan bahwa uji multikolonieritas telah terpenuhi.

4.6.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Salah satu metode yang digunakan adalah heterokedastisitas, adanya gejala heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Heterokedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linear, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut homokedastisitas (Gujarati dalam Elmasari, 2010:53). Teknik uji heterokedastisitas ini menggunakan metode Glejser dimana nilai probabilitas harus harus lebih besar dari dar α sebesar 5 % atau $\alpha = 0.05$.

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20302.68	2.045.517	9.925.454	0.0000
Makroprudential	0.001903	0.026028	0.073127	0.9422
Mikroprudential	0.027168	0.026028	1.043.782	0.3052

Sumber : Diolah Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel makroprudential dan mikroprudential tidak terjadi heteroskedastisitas sebab nilai probabilitas > 0.05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi.

4.6.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu model persamaan, terdapat korelasi yang merupakan kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan masalah pada kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Pada data time series biasanya sering terjadi masalah autokorelasi, masalah autokorelasi ini timbul karena residual, dari suatu penelitian ke penelitian selanjutnya (Ghozali, 2006).

Salah satu metode untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi atau tidak maka dilakukan pengujian, dimana hipotesis yang digunakan adalah jika nilai nilai probabilitas F statistik < 0.05 maka dinyatakan terdapat autokorelasi sedangkan apabila F statistik $>$ dari 0.05 maka dinyatakan bebas dari autokorelasi.

Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20302.68	2.045.517	9.925.454	0.0000
Makroprudential	0.001903	0.026028	0.073127	0.9422
Mikroprudential	0.027168	0.026028	1.043.782	0.3052
R-squared	0.060315	Mean dependent var		20302.68
Adjusted R-squared	-0.004491	S.D. dependent var		11545.30
S.E. of regression	11571.19	Akaike info criterion		2.163.948
Sum squared resid	3.88E+09	Schwarz criterion		2.177.690
Log likelihood	-3.432.318	Hannan-Quinn criter.		2.168.503
F-statistic	0.930701	Durbin-Watson stat		2.062.478
Prob(F-statistic)	0.405736			

Sumber : Diolah Penulis, 2020

Hasil uji autokorelasi data dapat dilihat bahwa nilai F – statistik sebesar 0.405736 sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model ini tidak terkena masalah autokorelasi karena nilai F – statistik lebih besar dari 0.05.

4.7 Hasil dan Uji Hipotesis Mix Estimation

Uji hipotesis mix estimation bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing masing variabel dari berbagai variabel makroprudential dan mikroprudential. Selanjutnya persamaan regresi diubah sebagai berikut.

Persamaan regresi dari uji hipotesis mix estimation untuk variabel makroprudential dan mikroprudential dituliskan sebagai berikut :

$$\text{SSK} = 1.250 - 0.143 (0.973 \text{ GWMLFR} - 0.916 \text{ LTV} + 0.749 \text{ NOP}) + 0.121 (-0.829 \text{ CAR} + 0.884 \text{ BOPO} + 0.958 \text{ LDR} + 0.193 \text{ ROA} - 0.528 \text{ NPL})$$

Atau :

$$\text{SSK} = 1.250 - 0.139 \text{ GWMLFR} - 0.130 \text{ LTV} + 0.107 \text{ NOP} + 0.100 \text{ CAR} + 0.106 \text{ BOPO} + 0.115 \text{ LDR} + 0.023 \text{ ROA} - 0.063 \text{ NPL}$$

Berdasarkan hasil persamaan mix estimation diatas dapat diketahui bahwa nilai dari variabel makroprudential dan mikroprudential yang memiliki pengaruh negatif adalah variabel GWM LFR dan LTV dari variabel makroprudential. Sedangkan, variabel NPL yang memiliki pengaruh negatif dari variabel mikroprudential. Sehingga jika terjadi peningkatan pada GWM LFR, LTV dan NPL maka akan Stabilitas Sistem Keuangan akan mengalami penurunan. Untuk variabel makroprudential yang memiliki pengaruh positif adalah NOP dan untuk variabel mikroprudential yang memiliki variabel positif adalah CAR, BOO, LDR dan ROA. Maka apabila NOP, CAR, BOO, LDR dan ROA mengalami peningkatan, hal ini juga akan menyebabkan kenaikan pada Stabilitas Sistem Keuangan.

Tingkat pengaruh masing masing suatu variabel dapat dilihat melalui dari loading faktor yang memiliki hipotesis yang nilai loading faktor < 0.5 maka pengaruh variabel tersebut lemah. Sedangkan sebaliknya jika nilai loading faktor > 0.5 maka pengaruh variabel tersebut kuat. Berikut ini adalah nilai loading faktor yang menunjukkan pengaruh dari masing masing variabel :

Tabel 4.12 Nilai Loading Faktor Mix Estimation

Komponen	Variabel	Nilai Loading	Nilai Komponen	Koefisien variabel	Keterangan
Makroprudential	GWM LFR	0.973	0.143	0.840	Kuat
	LTV	0.916	0.143	0.947	Kuat
	NOP	0.749	0.143	0.560	Kuat
Mikroprudential	CAR	0.829	0.121	0.109	Kuat
	BOPO	0.884	0.121	0.819	Kuat
	ROA	0.958	0.121	0.741	Kuat
	LDR	0.913	0.121	0.534	Kuat
	NPL	0.528	0.121	0.924	Kuat

Sumber : Data Diolah, 2020

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan membahas dan menjawab sesuai rumusan masalah yang telah dibuat. Pada bagian ini akan dijelaskan analisis hubungan faktor dari variabel makroprudential dan mikroprudential terhadap stabilitas sistem keuangan, juga akan dijelaskan satu persatu variabel yang memberikan pengaruh yang paling kuat terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan mikroprudensial melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap individu institusi keuangan sedangkan kebijakan makroprudensial melakukan pengawasan dan monitoring terhadap keseluruhan sistem keuangan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan berupa uji asumsi data dan uji regresi linear memberikan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara set variabel X atau variat X (melalui variabel CAR, NPL, BOPO, ROA, dan LDR) dengan set variabel Y atau variat Y (melalui variabel LTV, GWMLFR, dan NOP). Hal ini dapat dilihat dari hasil

pengujian *Multivariate Test Significance* melalui uji parsial (Uji T) dan uji Simultan (uji F) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 dan berada di bawah tingkat kepercayaan 0,05 (5%). Baik secara parsial dan simultan variabel makroprudential dan variabel mikroprudential seluruhnya memiliki hubungan yang signifikan yaitu berpengaruh secara positif terhadap stabilitas sistem keuangan.

1. Pengaruh variabel makroprudential terhadap stabilitas institusi keuangan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa variabel makroprudential berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan seluruh nilai dapat diketahui memiliki nilai yang bersifat kuat dalam mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai loading faktor pada penelitian ini, dimana ketiga variabel yang terdapat pada variabel makroprudential yaitu GWM LFR, LTV dan NOP memberikan hasil atau nilai yang menunjukkan bahwa variabel tersebut kuat dan dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara signifikan.

a. Pengaruh variabel GWM LFR terhadap stabilitas sistem keuangan

Hasil dari penelitian menemukan bahwa variabel GWM LFR memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini telah sesuai apabila ketika GWM LFR meningkat maka sangat berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan karena GWM LFR meningkat maka akan mengurangi gangguan sistemik dan risiko sistemik terhadap fungsi intermediasi perbankan. Variabel ini merupakan variabel yang penting dikarenakan variabel ini merupakan variabel penyangga likuiditas kebijakan makroprudential. Maka apabila variabel GWM LFR memiliki pengaruh yang positif terhadap stabilitas sistem keuangan dikatakan bahwa variabel ini mampu menjaga likuiditas sistem perbankan.

b. Pengaruh variabel LTV terhadap stabilitas sistem keuangan

Untuk variabel LTV memiliki pengaruh yang kuat terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan teori yang disebutkan LTV berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Menurut IMF (2009) bahwa risiko kredit termasuk dalam risiko endogen sistem keuangan, sehingga apabila perekonomian mengalami risiko kredit, maka langsung atau tidak langsung, besar maupun kecil, akan berpengaruh terhadap kestabilan keuangan. Menurut Gunadi (2013) bahwa LTV memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan.

c. Pengaruh variabel NOP terhadap stabilitas sistem keuangan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai loading faktor pada variabel NOP memiliki nilai yang kuat sehingga dikatakan bahwa variabel ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Dapat dilihat apabila NOP meningkat maka stabilitas sistem keuangan juga akan meningkat, dikarenakan apabila nilai nilai stabil dan kuat maka stabilitas sistem keuangan juga akan ikut menguat dan meningkat.

2. Pengaruh variabel mikroprudential terhadap stabilitas institusi keuangan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa variabel makroprudential berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan seluruh nilai dapat diketahui memiliki nilai yang bersifat kuat dalam mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai loading faktor pada penelitian ini, dimana ketiga variabel yang terdapat pada variabel makroprudential yaitu GWM LFR, LTV dan NOP memberikan hasil atau nilai yang menunjukkan bahwa variabel tersebut kuat dan dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara signifikan.

a. Pengaruh variabel CAR terhadap stabilitas sistem keuangan

Untuk variabel CAR memiliki pengaruh yang lemah terhadap stabilitas sistem keuangan. Dari hasil yang didapatkan ditemukan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini telah sesuai dengan teori pada tinjauan pustaka Chalermchatvichien (2014) dengan modal yang tinggi maka akan mengurangi risiko pada bank sehingga akan menciptakan stabilitas pada perbankan.

Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi rasio kecukupan modal dan tingkat kesehatan suatu bank akan semakin tinggi, sehingga kinerja suatu bank akan lebih baik. Dengan kecukupan modal yang tinggi maka semakin stabil suatu bank tersebut.

Dengan menjaga tingkat minimum CAR merupakan hal yang sangat krusial bagi perbankan untuk mencegah dari kegagalan (bangkrut). Dengan demikian peningkatan pada CAR berdampak pada penurunan nilai ISSK. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (2013).

b. Pengaruh variabel BOPO terhadap stabilitas sistem keuangan

Dari hasil uji ditemukan hasil bahwa variabel BOPO pengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang disebutkan Gunadi (2013) bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. BOPO memberikan hasil positif terhadap stabilitas institusi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa variabel BOPO berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena beban yang dimiliki bank lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya sehingga apabila pendapatan lebih tinggi pada variabel maka dinyatakan bahwa indeks stabilitas sistem keuangan juga dinyatakan stabil.

c. Pengaruh variabel LDR terhadap stabilitas sistem keuangan

Untuk variabel LDR memiliki pengaruh yang kuat terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan teori yang disebutkan pada kajian pustaka bahwa DPK berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Menurut IMF (2009) bahwa risiko likuiditas termasuk dalam risiko endogen institusi keuangan, sehingga apabila institusi keuangan mengalami risiko likuiditas, maka langsung atau tidak langsung, besar maupun kecil, akan berpengaruh terhadap kestabilan keuangan. Menurut Gunadi (2013) bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas institusi keuangan.

d. Pengaruh variabel ROA terhadap stabilitas sistem keuangan

Variabel ROA memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Menurut Gunadi (2010), ROA memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas institusi keuangan. ROA suatu bank menggambarkan pendapatan bank dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan suatu bank. Kinerja suatu bank tergolong sehat jika nilai ROA meningkat, jika dihubungkan dengan stabilitas sistem keuangan maka semakin tinggi nilai ROA maka semakin stabil bank tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritab Al-Khouri (2016) dan Aini (2015) bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan.

e. Pengaruh variabel NPL terhadap stabilitas sistem keuangan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa variabel NPL memiliki pengaruh yang kuat terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan teori pada bab sebelumnya. Pengaruh peningkatan NPL terhadap stabilitas sistem keuangan justru meningkatkan nilai stabilitas sistem keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena semakin besar NPL maka laba yang diperoleh bank semakin besar. Menurut Dabla-Norris dan Floerkemerier (2007), *spread* antara tingkat suku bunga kredit dengan deposit merupakan indikator inefisiensi lembaga intermediasi keuangan.

3. Faktor yang paling mempengaruhi stabilitas sistem keuangan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan untuk variabel makroprudential adalah seluruh variabel baik variabel GWM, LFR, LTV dan NOP seluruhnya mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Sedangkan untuk variabel mikroprudential YAITU, CAR, BOPO, ROA, LDR dan NPL seluruhnya juga turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. dapat diketahui dari nilai loading faktor pada penelitian ini, dimana keseluruhan variabel tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (2013) bahwa variabel pada kebijakan makroprudential berpengaruh positif terhadap stabilitas institusi keuangan. Hal ini dikarenakan karena faktor ini merupakan kegiatan utama dalam perbankan yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Sehingga faktor tersebut mengalami hambatan maka perbankan terganggu dan perbankan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya.

BAB 5**PENUTUP****5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan yakni variabel yang terdapat pada kebijakan makroprudential dan mikroprudential, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa secara simultan faktor pada kebijakan makroprudential berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Serta, faktor pada kebijakan mikroprudential juga memiliki hasil yang berpengaruh signifikan positif, yaitu berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Diartikan, variabel pada kebijakan makroprudential dan mikroprudential berpengaruh secara keseluruhan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
2. Secara parsial variabel makroprudential dan mikroprudential berpengaruh signifikan positif terhadap stabilitas sistem keuangan, jadi anatara masing masing variabel pada makroprudential dan mikroprudential dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara signifikan.
3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 14,8% variasi variabel dependen stabilitas sistem keuangan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yakni GWM LFR, LTV, NOP, CAR, BOPO, ROA, LDR, NPL. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model.
4. Variabel makroprudential dan mikroprudential berpengaruh positif terhadap stabilitas institusi keuangan. Bila dilihat dari Seluruh hasil Uji asumsi klasik bahwa seluruh nilai pada uji data tersebut lolos atau dengan kata lain layak dilakukan pengujian.

Kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial memiliki hubungan dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yaitu dengan mencegah timbulnya berbagai resiko yang timbul dalam sistem keuangan. Apabila individu institusi keuangan efektif dalam mengelola lembaga keuangan, maka memberikan dampak yang baik terhadap stabilitas sistem keuangan. Dan apabila kebijakan untuk sistem keuangan secara keseluruhan efektif, maka memberikan dampak yang baik terhadap stabilitas sistem keuangan dan individu institusi keuangan.

5.2 Saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada banker dan bank sentra selaku pembuat kebijakan untuk dapat menjaga intermediasi perbankan, dimana dalam hal ini merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi stabilitas institusi keuangan. Diharapkan agar bank dapat mengelola risiko likuiditas agar dapat menurunkan risiko sistemik untuk mengantisipasi terjadinya krisis perbankan yang berdampak sistemik melalui undang-undang sebagai jaring pengaman sistem keuangan.
2. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, baik itu faktor endogen, pasar, maupun faktor eksogen yaitu makroekonomi. Selain itu ruang lingkup penelitian juga dapat dikembangkan, penelitian lebih lanjut dapat lebih kompleks bukan hanya negara Indonesia saja namun dapat menggunakan negara-negara asean.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan ataupun pada Bank Indonesia sebagai lembaga terkait diharapkan tetap dapat menjaga kondisi stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang mampu mewujudkan stabilitas sistem keuangan antara lain kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial. Diharapkan kedua kebijakan tersebut bersinergi dalam menghindari maupun mengatasi risiko-risiko yang timbul dari sistem keuangan tersebut yang dapat menimbulkan instabilitas keuangan. Dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, mahasiswa, peneliti, ilmuwan dan lain-lain tentang kebijakan makroprudensial atau mikroprudensial beserta dengan instrumen kebijakan yang baru diterapkan di Indonesia.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam permasalahan tersebut, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan penyelesaian permasalahan penelitian dengan menambah variabel atau instrumen kebijakan makroprudensial maupun kebijakan mikroprudensial yang masih baru diterapkan dan juga dapat menambah jangka waktu penelitian.

Daftar Pustaka

Allena, Franklin and Elena Carletti. 2011. *New theories to underpin financial reform*. Elsevier.

Allena, Franklin and M. Santomero. 2001. *What do financial intermediaries do?*. Elsevier. Journal of Banking and Finance 25.

Alfiana. 2015. Determinan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakstabilan Sistem Keuangan Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 1(2), 173-190.

Bank Indonesia. 2009. Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014 : edisi Januari 2009. Bank Indonesia. Jakarta

Bank Indonesia. 2014. Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/ Pengaturan dan Pengawasan Kebijakan Makroprudential Indonesia. Bank Indonesia

Bank Indonesia. 2016. Stabilitas Sistem Keuangan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana ? . BookIt Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Bank Indonesia

Bank of englas. 2009. “ *The Role Of Macroprudential Policy*” discussion paper, bank england, 2009.

Bollard, Alan., at al. 2011. *Where we are going with macro and micro-prudential policies in New Zealand*.

Canuto, Otaviano. 2013. *Brazil, Korea: Two Tales of a Macroprudential Regulation*. The World Bank.

Central Bank of Sri Lanka. 2005. *Financial System Stability*. Pamphlet Series No.2.

Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Financial dan Lembaga-lembaga Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Deliarnov. 2014. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins. 2012. *Financial Markets and Institutions 7th ed.* Boston: Prentice Hall.

Galindo, Arturo J., et al. 2013. *Macroprudential Regulations in Andean Countries*. Center for Global Development. Working Paper 319.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gujarati. D. 2004. *Basic Econometrics Fourth Edition* New York The McGraw Hill Companies.

Gujarati, Damodar N. 2006. Dasar – Dasar Ekonometrika . Julius Milyadi. (Penerjemah). Jakarta : Penerbit Airlangga

Gunadi, Imam, Aditya Anta Taruna, C.A.H2013. Working Paper Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) Dalam Pelaksanaan Surveilans Makroprudential 0-55

Hadad. D. Muliawan. Santoso Wimboh dan Arianto Bambang. 2003 “Indikator Awal Krisis Perbankan”. Kajian Bank Indonesia Stabilitas Sistem Keuangan.

Halwani. Hendra. 2005. Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi Edisi Kedua Bogor : Ghalia Indonesia.

Hair, J. F., et al. 2010. *Multivariate Data Analysis*. (7 Edition). Ner Jersey : Person Education Unc.

Izazi, Sabila Aqlima dan Waskito, Adi. 2014. "Analisis Kompetensi Bank Umum Konvensional dan Stabilitas Perbankan di Indonesia Periode 2014 – 2018 : Sebuah Pendekatan Struktural dan Non Struktural" *Departement Of Management Faculty Economics*, Universitas Indonesia : Jakarta.

Jhonson, D. E. 1998. *Applied Multivariate Methods For Data Analysis*. USA : Brooks / Cole Publishing Company.

Judisenno. Risky K. 2005. "Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia". Jakarta Pt. Gramedia Pustaka Utama.

Kajian Stabilitas Keuangan. " Menjaga Sistem Stabilitas Keuangan Mendorong Perekonomian". Bank Indonesia No. 29, September 2017.

Khattree, R, and Dayanand, N. N. 2000. *Mulivariate Data Reduction And Discrimination With SAS Software*. North Carolina : SAS Institute Inc

Morrison. 1976. *Multivariate Statistics Methods*. Second Edition. Sidney : Mc Graw Hill Inc

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Stabilitas Sistem Keuangan*.
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitassistemkeuangan/Pages/ikhtisar.aspx>.
 Diakses pada 23 februari 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangannomor 6/POJK Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Suci Astutik, Solimun, Darmanto. 2018. "Analisis Multivariat Teori Dan Aplikasinya dan SAS". Malang : Badan Penerbit Universitas Brawijaya.

Sugiono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Supranto, J. 2010. "Analisis multivariat arti dan interpretasi". Jakarta : Rineka cipta.

Yitnosumarto, S., 1991. Percobaan : Perancangan Analisis Daan Intrepretasinya. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.



Lampiran

1. Data Variabel Variabel Makroprudential

Tahun	LTV	GWM LFR	NOP
2012_1	9919088,8	2869626,37	1216871,65
2012_2	10260442,8	3152997,97	1243893,06
2012_3	10694492	2165136,41	1173097,97
2012_4	10958236,8	3765576,03	933172,61
2013_1	10910290,5	2868044,52	1324897,42
2013_2	13388706,5	3179642,34	973909,42
2013_3	12585211,8	2709327,83	845090,21
2013_4	12685276	3233591,17	912213,61
2014_1	13823835,8	2658201,25	1011973,32
2014_2	15151562,8	2049356,37	1482446,14
2014_3	15880002	1634043,15	1121902,25
2014_4	19213477,3	2557042,16	1049869,37
2015_1	18704810,3	1569897,48	947510,41
2015_2	20750347,8	1329108,05	1121923,66
2015_3	21963667,8	1170388,07	1247848,18
2015_4	23991613	936120,97	904327,12
2016_1	26425875	634698,85	1402715,77
2016_2	28659853	454165,35	1283509,87
2016_3	28542820,3	415391,62	1439983,84
2016_4	28642163	271302,74	1390091,65
2017_1	28629181,5	90524,46	1598011,51
2017_2	26222191,3	262210,04	1126883,45
2017_3	28991607	228972,59	879273,28
2017_4	29677588,5	137742,04	1554247,04
2018_1	29435503,5	343857,67	2071568,53
2018_2	30007561,8	262776,3	3506946,55
2018_3	32824980	262776,3	1434044,75
2018_4	33854008,8	262776,3	1817688,18
2019_1	33658320	127027,2	3048937,11
2019_2	35673236,3	260026,01	3249073,01
2019_3	36060510,5	339016,76	6427799,03
2019_4	37160335,5	381718,9	4164519,29

2. Data Variabel Kebijakan Mikroprudential

Tahun	CAR	NPL	ROA	BOPO	LDR
2012_1	0,1583	0,041	0,0291	0,7678	0,6564
2012_2	0,1504	0,0397	0,0282	0,7785	0,6617
2012_3	0,1497	0,0379	0,028	0,7745	0,7104
2012_4	0,1453	0,0289	0,03	0,7547	0,6359
2013_1	0,1523	0,03	0,0315	0,7135	0,6632
2013_2	0,1416	0,0293	0,0306	0,722	0,6804
2013_3	0,1316	0,0295	0,032	0,7121	0,6995
2013_4	0,1481	0,0248	0,0357	0,692	0,6648
2014_1	0,1682	0,0256	0,0375	0,6564	0,7035
2014_2	0,1568	0,0264	0,0375	0,6623	0,739
2014_3	0,1525	0,0253	0,0377	0,6661	0,7551
2014_4	0,1512	0,0215	0,0377	0,6684	0,6997
2015_1	0,1711	0,0227	0,0346	0,6796	0,7474
2015_2	0,159	0,0208	0,0362	0,66	0,7565
2015_3	0,1597	0,0202	0,0365	0,6538	0,7749
2015_4	0,1584	0,0169	0,038	0,6432	0,7566
2016_1	0,1734	0,0177	0,0363	0,6426	0,8106
2016_2	0,163	0,0164	0,0373	0,6324	0,823
2016_3	0,1595	0,0159	0,0377	0,6353	0,8377
2016_4	0,1567	0,0144	0,0397	0,629	0,8304
2017_1	0,1692	0,0158	0,0383	0,6569	0,8603
2017_2	0,1678	0,0161	0,0386	0,6533	0,838
2017_3	0,1713	0,0162	0,0389	0,6612	0,8281
2017_4	0,17	0,0148	0,0392	0,6564	0,8207
2018_1	0,1879	0,017	0,0364	0,6776	0,8174
2018_2	0,1855	0,0199	0,0309	0,723	0,8354
2018_3	0,1876	0,0205	0,0332	0,7078	0,8373
2018_4	0,1933	0,0193	0,0355	0,6908	0,8569
2019_1	0,1947	0,0226	0,0321	0,7142	0,8561
2019_2	0,2086	0,0259	0,0296	0,7312	0,8663
2019_3	0,2111	0,0263	0,0311	0,7136	0,8767
2019_4	0,2138	0,0257	0,0311	0,71	0,8529

3. Analisis Faktor Makroprudential

Communalities

	Initial	Extraction
LTV	1.000	.947
GWMLFR	1.000	.840
NOP	1.000	.560

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
LTV	.973
GWMLFR	-.916
NOP	.749

Extraction Method: Principal Component Analysis.



4. Analisis Faktor Mikroprudential

Communalities

	Initial	Extraction
CAR	1.000	.109
NPL	1.000	.924
ROA	1.000	.741
BOPO	1.000	.819
LDR	1.000	.534

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
CAR	.330
NPL	-.961
ROA	.861
BOPO	-.905
LDR	.731

Extraction Method: Principal Component Analysis.



5. Hasil Uji Regresi Makroprudential Dan Mikroprudential

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.451 ^a	.203	.148	.24440

a. Predictors: (Constant), F2, F1

b. Dependent Variable: SSK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.250	.043		28.939	.000
	F1	-.143	.055	-.540	-2.602	.014
	F2	.121	.055	.456	2.198	.036

a. Dependent Variable: SSK

ANOVA^a

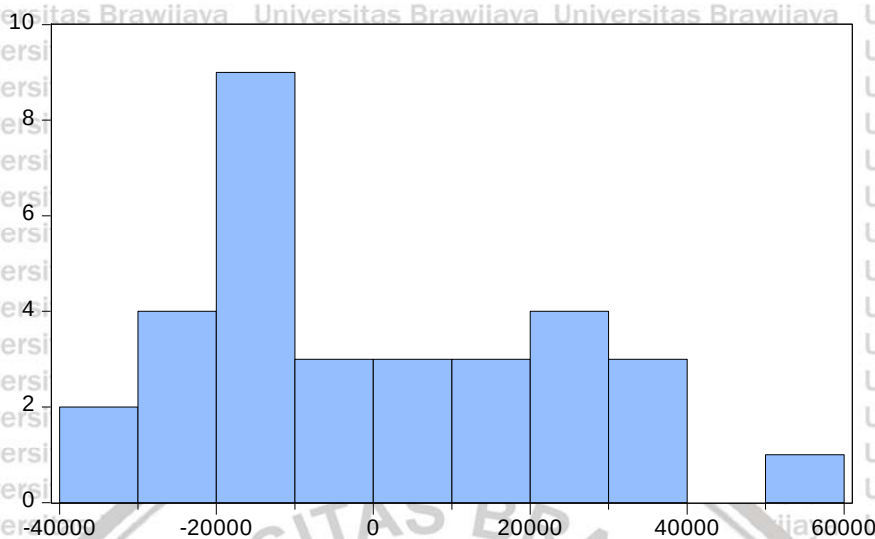
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.442	2	.221	3.698	.037 ^b
	Residual	1.732	29	.060		
	Total	2.174	31			

a. Dependent Variable: SSK

b. Predictors: (Constant), F2, F1

6. Hasil Uji Asumsi Klasik

* Hasil Uji Normalitas



Series: Residuals

Sample 1 32

Observations 32

Mean 2.27e-13

Median -8803.971

Maximum 55802.07

Minimum -38782.91

Std. Dev. 23638.73

Skewness 0.501504

Kurtosis 2.277181

Jarque-Bera 2.037989

Probability 0.360958

* Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 03/15/20 Time: 22:57

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	18666459	1.000000	NA
MAKROPRUDENTIAL	0.003022	1.568508	1.568508
MIKROPRUDENTIAL	0.003022	1.568508	1.568508

***Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.930701	Prob. F(2,29)	0.4057
Obs*R-squared	1.930077	Prob. Chi-Square(2)	0.3810
Scaled explained SS	1.148215	Prob. Chi-Square(2)	0.5632

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 03/15/20 Time: 22:59

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20302.68	2045.517	9.925454	0.0000
MAKROPRUDENTIAL	0.001903	0.026028	0.073127	0.9422
MIKROPRUDENTIAL	0.027168	0.026028	1.043782	0.3052

R-squared	0.060315	Mean dependent var	20302.68
Adjusted R-squared	-0.004491	S.D. dependent var	11545.30
S.E. of regression	11571.19	Akaike info criterion	21.63948
Sum squared resid	3.88E+09	Schwarz criterion	21.77690
Log likelihood	-343.2318	Hannan-Quinn criter.	21.68503
F-statistic	0.930701	Durbin-Watson stat	2.062478
Prob(F-statistic)	0.405736		

***Hasil Uji Autokorelasi**

Dependent Variable: SSK

Method: Least Squares

Date: 03/15/20 Time: 22:52

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.062500	4320.470	-1.45E-05	1.0000
MAKROPRUDENTIAL	-4.72E-07	0.054975	-8.59E-06	1.0000
MIKROPRUDENTIAL	1.69E-07	0.054975	3.07E-06	1.0000

R-squared	0.000000	Mean dependent var	-0.062500
Adjusted R-squared	-0.068966	S.D. dependent var	23638.73
S.E. of regression	24440.27	Akaike info criterion	23.13491
Sum squared resid	1.73E+10	Schwarz criterion	23.27232
Log likelihood	-367.1586	Hannan-Quinn criter.	23.18046
F-statistic	4.04E-11	Durbin-Watson stat	1.921496
Prob(F-statistic)	1.000000		

